



# CETAK BIRU

## PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR JASA KEUANGAN

2021-2025

*SDM Profesional,  
Berintegritas, dan  
Berdaya Saing Global*

# CETAK BIRU

## PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR JASA KEUANGAN 2021-2025

SDM Profesional, Berintegritas,  
dan Berdaya Saing Global



**“Harapan kami, Cetak Biru Pengembangan SDM SJK ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pelaku industri sektor jasa keuangan dalam mengembangkan berbagai program peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM agar pengembangan SDM di masing-masing sektor jasa keuangan dapat lebih terarah dan memiliki standar yang terukur bagi seluruh pemangku kepentingan.”**



**D**alam rangka pengembangan sektor jasa keuangan yang dihadapkan pada berbagai tantangan baik dari ketidakpastian ekonomi global dan domestik maupun perkembangan teknologi yang begitu pesat, OJK telah menyusun Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 sebagai kerangka dasar arah kebijakan strategis sektor jasa keuangan sehingga sektor jasa keuangan mampu tumbuh secara berkelanjutan, *resilient*, berdaya saing serta berperan optimal bagi pembangunan nasional.

Dalam Master Plan tersebut ditegaskan bahwa pengembangan sektor jasa keuangan yang berdaya saing perlu didukung oleh kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) sektor jasa keuangan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing global. Lembaga jasa keuangan dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan menciptakan layanan keuangan yang cepat, mudah, murah, andal, dan berorientasi pada konsumen sehingga mampu bersaing secara nasional dan global. Untuk itu, sektor jasa keuangan yang didukung dengan kapasitas SDM yang berdaya saing akan sangat dibutuhkan dalam menghadapi kompetisi yang begitu tinggi dengan semakin kompleks dan *borderless*-nya produk keuangan serta masifnya pemanfaatan teknologi.

Mengingat begitu strategisnya peran SDM dalam pengembangan sektor jasa keuangan yang berdaya



saing dan berperan optimal, OJK memiliki komitmen yang tinggi untuk terus mengawal pengembangan kapasitas SDM di industri jasa keuangan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, OJK telah menyusun dan menerbitkan Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025 sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam menentukan arah dan prioritas pengembangan SDM khususnya dalam mendukung kesiapan menghadapi perkembangan terkini. Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan ini disusun secara bersama-sama dengan para pemangku kepentingan, yaitu asosiasi kelembagaan/profesi dan akademisi, sehingga kami berharap masing-masing pihak dapat melaksanakan program pengembangan SDM baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya.

Akhir kata, kami atas nama Dewan Komisioner OJK menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berperan serta dan berkontribusi dalam penyusunan Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025. Harapan kami, Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pelaku industri sektor jasa keuangan dalam mengembangkan berbagai program peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM agar pengembangan SDM di masing-masing sektor jasa keuangan dapat lebih terarah dan memiliki standar yang terukur bagi seluruh pemangku kepentingan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat, karunia dan ridho-Nya atas seluruh kerja nyata kita dalam mewujudkan sektor jasa keuangan nasional yang lebih maju.

Ketua Dewan Komisioner  
Otoritas Jasa Keuangan  
**Wimboh Santoso**



**“ ...sektor jasa keuangan merupakan industri yang strategis, sehingga pengembangan sumber daya manusia sektor jasa keuangan perlu dituangkan dalam suatu cetak biru. ”**



**P**uji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025. Dengan selesainya Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025, maka kita telah memiliki suatu pedoman untuk mengembangkan sumber daya manusia sektor jasa keuangan dalam jangka panjang.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong OJK menyusun Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025. Faktor-faktor tersebut antara lain kesenjangan kompetensi, perkembangan teknologi digital, penerapan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC), kondisi global, dan pertumbuhan ekonomi syariah. Di samping itu, sektor jasa keuangan merupakan industri yang strategis, sehingga pengembangan sumber daya manusia sektor jasa keuangan perlu dituangkan dalam suatu cetak biru.

Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025 merupakan suatu kerangka acuan yang terperinci sebagai landasan dalam perencanaan dan penyusunan program-program pengembangan sumber daya manusia sektor jasa keuangan. Dengan demikian,



para pemangku kepentingan akan mendapatkan kesamaan persepsi dan prioritas dalam menyusun strategi serta melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia di masing-masing industri maupun lembaga.

Pada kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung Otoritas Jasa Keuangan dalam penyusunan Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025, yaitu para

pimpinan dari satuan kerja di internal Otoritas Jasa Keuangan, pimpinan berbagai industri keuangan, pimpinan asosiasi lembaga/profesi di sektor jasa keuangan, serta para akademisi. Penghargaan yang tinggi juga kami sampaikan kepada para anggota tim penyusun dan penulis Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025. Semoga Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025 dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan.

Wakil Ketua Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan

**Nurhaida**





## KATA PENGANTAR

---

**K**ami ucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkah dan rahmat-Nya, Otoritas Jasa Keuangan Institute (OJK Institute) telah menyelesaikan Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021–2025. Penyusunan Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021–2025 ini merupakan tindak lanjut dan pelaksanaan dari Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021–2025.

Penyusunan Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021–2025 ini dilakukan dengan melibatkan pihak internal dan eksternal OJK, sehingga semua isu dan permasalahan yang terkait dengan sektor jasa keuangan di Indonesia sudah terakomodasi dalam cetak biru ini. Selanjutnya dengan kolaborasi tersebut diharapkan semua pemangku kepentingan memiliki komitmen dan peran aktif dalam mengimplementasikan Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021–2025 di masing-masing industri jasa keuangan. Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021–2025 ini terdiri

dari tiga bab yang berisi latar belakang, cetak biru, dan rencana kegiatan.

Kami berharap Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021–2025 dapat memberikan kontribusi dan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun program pengembangan sumber daya manusia di sektor jasa keuangan. Dengan demikian, nantinya dapat dihasilkan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing global dalam rangka meningkatkan kinerja sektor jasa keuangan. Di samping itu, Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021–2025 ini tentunya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengaturan dan pengawasan OJK, maupun pengembangan sumber daya manusia di masing-masing lembaga jasa keuangan.

Akhir kata, besar harapan kami Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021–2025 ini dapat memberikan sumbangan dalam mencetak sumber daya manusia unggul demi terciptanya Indonesia maju.

Tim Perumus Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Sektor Jasa Keuangan 2021-2025

**OJK Institute**



## PENGARAH

**Nurhaida** | Wakil Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

**Imansyah** | Deputi Komisiner OJK Institute dan Keuangan Digital

## TIM PERUMUS

### OJK INSTITUTE

Kepala OJK Institute	<b>Agus Sugiarto</b>
Direktur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan	<b>Hikmah Rinaldi</b>
Analisis Eksekutif Senior OJK Institute	<b>Ni Nyoman Puspani</b>
Deputi Direktur Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan	<b>Frevita Maheswari</b>
Analisis Senior Direktorat Pengembangan Sektor Jasa Keuangan	<b>Bonardo</b>
Analisis Senior Direktorat Pengembangan Sektor Jasa Keuangan	<b>Gunarsih Dwarachandra</b>
Analisis Senior OJK Institute	<b>Baruna Hadibrata</b>
Analisis Direktorat Pengembangan Sektor Jasa Keuangan	<b>Insani Kembang Dedhari</b>
Analisis Junior Direktorat Pengembangan Sektor Jasa Keuangan	<b>Faris Zul Hilmi</b>
Analisis Junior OJK Institute	<b>Muhamad Rizal Azhari</b>
Analisis Junior Direktorat Pengembangan Sektor Jasa Keuangan	<b>Rudi Harianto Junaedy Siagian</b>
Analisis Junior Direktorat Pengembangan Sektor Jasa Keuangan	<b>Billy Saputra</b>
Administrator Pertama Direktorat Pengembangan Sektor Jasa Keuangan	<b>Wirandika Harizki</b>
Jasa Penunjang Pelaksana Penelitian OJK Institute	<b>Fadhila Zahra Humaira</b>

## TIM PENDUKUNG

### SATUAN KERJA INTERNAL

Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan  
 Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan  
 Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan  
 Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis  
 Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan  
 Departemen Pengawasan Bank 1  
 Departemen Pengawasan Bank 2  
 Departemen Pengawasan Bank 3  
 Departemen Pengawasan Bank Syariah  
 Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A  
 Departemen Pengawasan Pasar Modal 1B  
 Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A  
 Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B  
 Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 1A  
 Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 1B  
 Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 2A  
 Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 2B  
 Departemen Pengawasan Khusus Industri Keuangan Non Bank  
 Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia  
 Departemen Hukum  
 Departemen Perlindungan Konsumen  
 Kantor Regional 1 DKI Jakarta dan Banten  
 Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah

### ASOSIASI SEKTOR PERBANKAN

Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS)  
 Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia (PERBINA)  
 Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO)  
 Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA)  
 Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO)  
 Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)  
 Forum Human Capital Perbankan Indonesia (FHCPI)  
 Ikatan Bankir Indonesia (IBI)  
 Bankers Association for Risk Management (BARA)  
 Certified Wealth Managers' Association (CWMA)  
 Indonesia Risk Professional Association (IRPA)  
 Forum Human Capital Perbankan Indonesia (FHCPI)  
 Indonesia Money Broker Association (INAMBA)  
 Association Cambiste Internationale the Financial Market Association of Indonesia (ACI FMA Indonesia)

### ASOSIASI SEKTOR PASAR MODAL

Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)  
 Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)  
 Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI)  
 Asosiasi Penasihat Investasi Indonesia (APII)  
 Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia (PROPAMI)

### ASOSIASI SEKTOR IKNB

Dewan Asuransi Indonesia (DAI)  
 Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)  
 Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)  
 Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)  
 Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)  
 Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI)  
 Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (PDPLK)  
 Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO)  
 Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APPARINDO)  
 Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia (APKAI)  
 Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH)  
 Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)  
 Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI)  
 Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI)  
 Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)  
 Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia (Amvesindo)  
 Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI)



# DAFTAR ISI

---

ii	Sambutan
iv	Sekapur Sirih
vi	Kata Pengantar
vii	Tim Penyusun
viii	Daftar Isi
ix	Daftar Gambar
x	Daftar Grafik
x	Daftar Tabel
xi	Daftar Akronim dan Singkatan

## 01 BAB 1: LATAR BELAKANG

---

03	1.1 Transformasi Digital
07	1.2 Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan
09	1.3 Kesenjangan Kompetensi
13	1.4 Kondisi Global
16	1.5 Potensi Ekonomi Syariah
19	1.6 Perlindungan Konsumen
20	1.7 Sektor Strategis
25	1.8 Perlunya Arah Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan

## 31 BAB 2: CETAK BIRU PENGEMBANGAN SDM SEKTOR JASA KEUANGAN 2021-2025

---

32	2.1 Visi dan Misi
33	2.2 Tujuan
34	2.3 Prinsip Dasar
34	2.4 Sasaran
35	2.5 Metode Pendekatan
36	2.6 Tantangan
37	2.7 Kerangka Dasar

## 41 BAB 3: RENCANA KEGIATAN

---

42	3.1 Peta Jalan Misi
42	3.1.1 Mengembangkan Standardisasi Kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan
43	3.1.2 Mengembangkan Metode Peningkatan Kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan
44	3.1.3 Mengembangkan Infrastruktur Pendukung Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan
45	3.1.4 Mengembangkan SDM Sektor Jasa Keuangan yang Memiliki Kompetensi Digital
46	3.2 Jadwal Kegiatan
47	3.3 Implementasi Tahunan
57	Daftar Pustaka

---



02	Gambar 1.1	Latar Belakang Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan
04	Gambar 1.2	Statistik Digital Indonesia Tahun 2021
05	Gambar 1.3	Peran Penting Aplikasi Digital
06	Gambar 1.4	Perubahan Kebutuhan Profesi pada Industri Jasa Keuangan
07	Gambar 1.5	Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan
08	Gambar 1.6	Interaksi Model Keunggulan GRC
13	Gambar 1.7	Faktor-Faktor Globalisasi
15	Gambar 1.8	Ekosistem Keuangan Berkelanjutan Indonesia
18	Gambar 1.9	Kondisi Ekonomi Syariah Saat Ini
18	Gambar 1.10	Target Ekonomi Syariah Tahun 2024
22	Gambar 1.11	Realisasi Penerimaan Pajak dan Kontribusinya
24	Gambar 1.12	Pembiayaan Infrastruktur
25	Gambar 1.13	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
27	Gambar 1.14	Cetak Biru dan Strategi Arah Pengembangan SDM di Beberapa Sektor
28	Gambar 1.15	Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025
32	Gambar 2.1	Visi dan Misi Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan
33	Gambar 2.2	Tujuan Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan
34	Gambar 2.3	Prinsip Dasar Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan
34	Gambar 2.4	Sasaran Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan
35	Gambar 2.5	Metode Top Down
35	Gambar 2.6	Metode Bottom Up
36	Gambar 2.7	Metode Triple Helix
36	Gambar 2.8	Tantangan Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan
37	Gambar 2.9	Kerangka Dasar Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan
46	Gambar 3.1	Jadwal Kegiatan



## DAFTAR GRAFIK

---

03	Grafik 1.1	Penggerak Transformasi Digital di Sektor Perbankan
05	Grafik 1.2	Jumlah Kantor Bank Umum
09	Grafik 1.3	Lima Peringkat Teratas Negara ASEAN pada World Talent Ranking 2020
09	Grafik 1.4	Lima Peringkat Teratas Negara ASEAN pada Finance Skills Ranking 2020
11	Grafik 1.5	Indeks Keterampilan Digital pada Populasi Aktif
12	Grafik 1.6	Kekurangan Ketersediaan SDM Berdasarkan Bidang
13	Grafik 1.7	Tenaga Kerja Asing di Indonesia
14	Grafik 1.8	Global Competitiveness Index Tahun 2019
14	Grafik 1.9	Global Innovation Index Tahun 2020
16	Grafik 1.10	Aset Keuangan Syariah Global
17	Grafik 1.11	Total Aset Keuangan Syariah
17	Grafik 1.12	Market Share Keuangan Syariah
19	Grafik 1.13	Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
20	Grafik 1.14	Total Aset Perbankan, IKNB, dan Kapitalisasi Pasar Modal
23	Grafik 1.15	Penyaluran Kredit UMKM terhadap Total Penyaluran Kredit Perbankan
23	Grafik 1.16	Persentase Debitur UMKM terhadap Total Debitur Perbankan
24	Grafik 1.17	Kredit Konstruksi di Perbankan
26	Grafik 1.18	Penilaian Tokoh Publik dalam Pembangunan SDM



## DAFTAR TABEL

---

10	Tabel 1.1	Proyeksi Peringkat Indonesia di Ekonomi Dunia pada Tahun 2030
15	Tabel 1.2	Peluang Investasi, Lapangan Kerja dan Pengurangan Emisi Karbon
15	Tabel 1.3	Sustainable Banking Assessment 2020
16	Tabel 1.4	Top 10 Global Islamic Economy Indicator Score Rank and By Islamic Finance
21	Tabel 1.5	Jumlah Pelaku Usaha Sektor Jasa Keuangan
22	Tabel 1.6	Aliran Kredit ke 17 Sektor Usaha
38	Tabel 2.1	Pembagian Peran Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan
42	Tabel 3.1	Peta Jalan Misi 1
43	Tabel 3.2	Peta Jalan Misi 2
44	Tabel 3.3	Peta Jalan Misi 3
45	Tabel 3.4	Peta Jalan Misi 4
47	Tabel 3.5	Implementasi 2021
49	Tabel 3.6	Implementasi 2022
51	Tabel 3.7	Implementasi 2023
53	Tabel 3.8	Implementasi 2024
55	Tabel 3.9	Implementasi 2025

# DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN



<b>AAJI</b>	: Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia	<b>INAMBA</b>	: Indonesia Money Broker Association
<b>AAMAI</b>	: Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia	<b>IRPA</b>	: Indonesia Risk Professional Association
<b>AASI</b>	: Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia	<b>Kemendikbud</b>	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
<b>AAUI</b>	: Asosiasi Asuransi Umum Indonesia	<b>Kemenkes</b>	: Kementerian Kesehatan
<b>ACI FMA Indonesia</b>	: Association Cambiste Internationale the Financial Market Association of Indonesia	<b>Kemenkeu</b>	: Kementerian Keuangan
<b>ADPI</b>	: Asosiasi Dana Pensiun Indonesia	<b>Kemenparekraf</b>	: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
<b>AEI</b>	: Asosiasi Emiten Indonesia	<b>Kementerian</b>	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
<b>AFPI</b>	: Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia	<b>ESDM</b>	
<b>AFSI</b>	: Asosiasi Fintech Syariah Indonesia	<b>Kementerian</b>	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
<b>AFTECH</b>	: Asosiasi Fintech Indonesia	<b>PPN/Bappenas</b>	
<b>AI</b>	: Artificial Intelligence	<b>Kemkominfo</b>	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
<b>Amvesindo</b>	: Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia	<b>Kemnaker</b>	: Kementerian Ketenagakerjaan
<b>APEI</b>	: Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia	<b>KKNI</b>	: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
<b>APII</b>	: Asosiasi Penasihat Investasi Indonesia	<b>KMS</b>	: <i>Knowledge Management System</i>
<b>APKAI</b>	: Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia	<b>LJK</b>	: Lembaga Jasa Keuangan
<b>APPARINDO</b>	: Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia	<b>LSP</b>	: Lembaga Sertifikasi Profesi
<b>APPI</b>	: Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia	<b>LST</b>	: Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola
<b>APRDI</b>	: Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia	<b>MPSJKI</b>	: Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia
<b>APU PPT</b>	: Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	<b>OJK</b>	: Otoritas Jasa Keuangan
<b>ASBANDA</b>	: Asosiasi Bank Pembangunan Daerah	<b>PAI</b>	: Persatuan Aktuaris Indonesia
<b>ASBISINDO</b>	: Asosiasi Bank Syariah Indonesia	<b>PDB</b>	: Produk Domestik Bruto
<b>ASIPPINDO</b>	: Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia	<b>PDPLK</b>	: Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan
<b>ATM</b>	: Anjungan Tunai Mandiri	<b>PERBANAS</b>	: Perhimpunan Bank Nasional
<b>BARa</b>	: Bankers Association for Risk Management	<b>PERBARINDO</b>	: Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia
<b>BPS</b>	: Badan Pusat Statistik	<b>PERBINA</b>	: Perhimpunan Bank-bank Internasional Indonesia
<b>CWMA</b>	: Certified Wealth Managers' Association	<b>PPGI</b>	: Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia
<b>DAI</b>	: Dewan Asuransi Indonesia	<b>PPP</b>	: Purchasing Power Parity
<b>DSN-MUI</b>	: Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia	<b>PROPAMI</b>	: Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia
<b>ESDM</b>	: Energi dan Sumber Daya Mineral	<b>PwC</b>	: PricewaterhouseCoopers
<b>EY</b>	: Ernst & Young	<b>Regtech</b>	: Regulatory Technology
<b>FHCPI</b>	: Forum Human Capital Perbankan Indonesia	<b>RPJMN</b>	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
<b>Fintech</b>	: Financial Technology	<b>SDM</b>	: Sumber Daya Manusia
<b>GDP</b>	: Gross Domestic Product	<b>SDGs</b>	: Sustainable Development Goals
<b>GIEI</b>	: Global Islamic Economy Indicator	<b>SJK</b>	: Sektor Jasa Keuangan
<b>GRC</b>	: Governance Risk Compliance	<b>SKKNI</b>	: Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
<b>HIMBARA</b>	: Himpunan Bank Milik Negara	<b>Suptech</b>	: Supervisory Technology
<b>IBI</b>	: Ikatan Bankir Indonesia	<b>UMKM</b>	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
<b>IFC</b>	: International Finance Corporation	<b>WEF</b>	: World Economic Forum
<b>IKNB</b>	: Industri Keuangan Non Bank	<b>WIPO</b>	: World Intellectual Property Organization
<b>IMB</b>	: Institute of Management Development	<b>WWF</b>	: World Wide Fund for Nature



# BAB 1

# LATAR BELAKANG





# BAB 1 LATAR BELAKANG

**08** Kerangka acuan pengembangan SDM sektor jasa keuangan belum tersedia.

**07** Total aset (perbankan dan IKNB) dan kapitalisasi Pasar Saham dan Surat Utang *Outstanding* (Pasar Modal) di sektor jasa keuangan sebesar Rp23.234 triliun (per Desember 2020). Tingkat kesehatan dan kestabilan industri jasa keuangan sangat bergantung pada kualitas SDM di sektor jasa keuangan, sehingga dibutuhkan arah pengembangan SDM bagi sektor jasa keuangan untuk mewujudkan SDM yang berkompeten dan berdaya saing.

**06** Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam mendukung tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan, sehingga dibutuhkan SDM yang mampu melayani konsumen dengan baik.

**05** Peningkatan aset keuangan syariah di Indonesia mencapai Rp1.802,86 triliun dan pangsa pasar mencapai 9,89% (per Desember 2020). Seiring dengan berkembangnya keuangan syariah tersebut, perlu didukung oleh ketersediaan SDM yang berkualitas.

Disrupsi digital telah mengubah lanskap sektor jasa keuangan secara signifikan sebagai akibat adanya penyesuaian terhadap perubahan perilaku masyarakat yang berbasis digital. Oleh karena itu, sektor jasa keuangan perlu segera melakukan transformasi digital dalam proses bisnis mereka.

Hingga saat ini masih ditemukan *fraud* di industri, sehingga SDM perlu dibekali kompetensi terkait "tiga lini pertahanan" (unit bisnis, unit kepatuhan, dan unit audit internal) serta Anti Pencucian Uang, dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Terdapat kesenjangan kompetensi antara kompetensi SDM yang dibutuhkan dengan kompetensi SDM yang tersedia. Perlunya *link and match* dalam mengisi kebutuhan kompetensi.

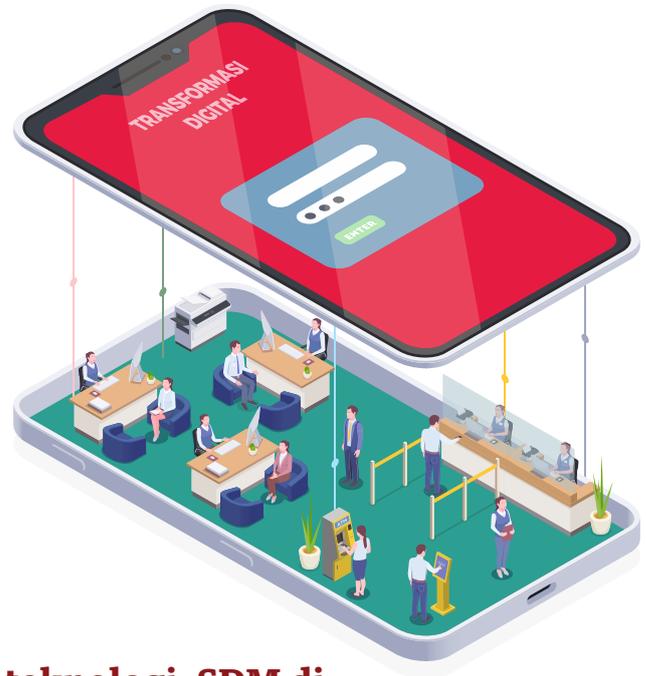
Dinamika perubahan global yang terjadi di masa lalu dan masa mendatang harus diantisipasi melalui penyiapan SDM yang berkualitas.

Gambar 1.1 Latar Belakang Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan

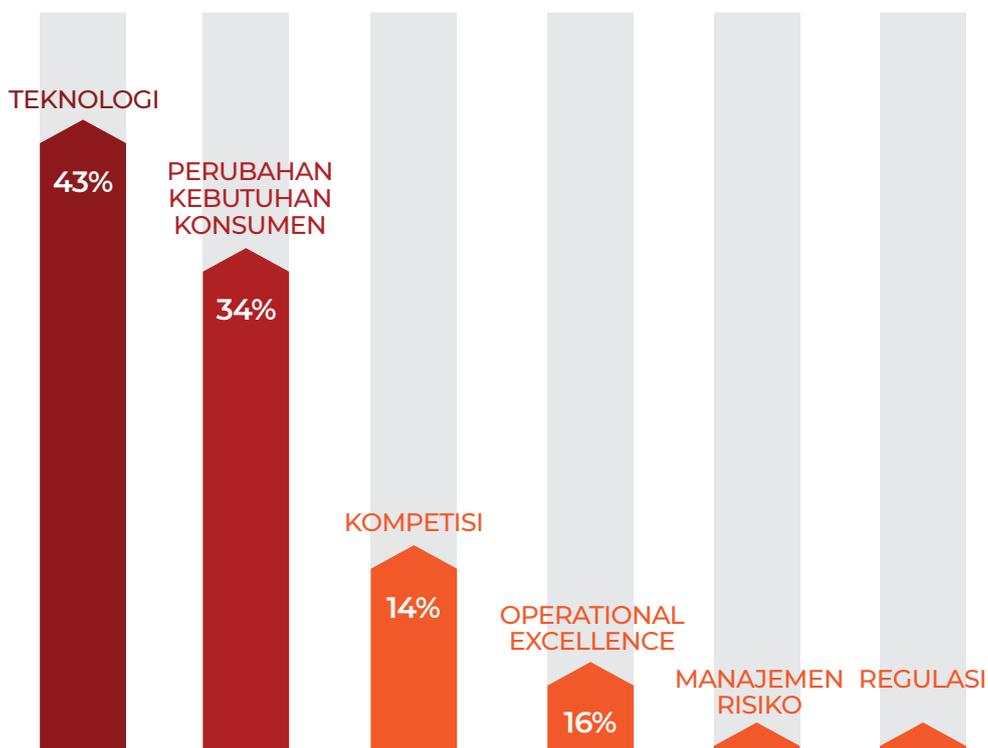


# 1.1 TRANSFORMASI DIGITAL

Perkembangan teknologi digital telah mengakibatkan perubahan yang begitu luas terhadap berbagai aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang layanan jasa keuangan. Survei yang dilakukan PricewaterhouseCoopers Indonesia (2018) menunjukkan bahwa faktor teknologi merupakan faktor utama yang mempengaruhi transformasi digital di sektor perbankan (Grafik 1.1).



**“ Menghadapi perkembangan teknologi, SDM di sektor jasa keuangan perlu melakukan peningkatan kompetensi terutama terkait dengan teknologi digital. ”**



Grafik 1.1 Penggerak Transformasi Digital di Sektor Perbankan



## BAB 1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan DataReportal (Januari 2021) terdapat 202,6 juta pengguna internet atau setara dengan 73,7% dari total populasi penduduk di Indonesia (Gambar 1.2). Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan perilaku konsumen dalam mengakses produk dan jasa keuangan secara digital.

**“ Untuk merespons perubahan perilaku konsumen, sektor jasa keuangan perlu SDM yang kompeten dalam rangka meningkatkan kualitas dan ragam layanan produk jasa keuangan yang berbasis teknologi digital. ”**

TOTAL POPULASI  
PENDUDUK INDONESIA



**274,9**  
JUTA

KONEKTIVITAS  
MOBILE PHONE



**345,3**  
JUTA

PENGGUNA  
INTERNET



**202,6**  
JUTA

PENGGUNA AKTIF  
MEDIA SOSIAL



**170**  
JUTA



**Gambar 1.2** Statistik Digital Indonesia Tahun 2021  
Sumber: DataReportal (2021)



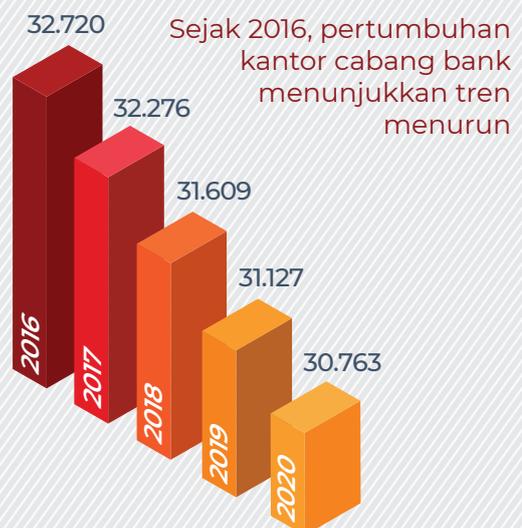
Melalui *omnichannel*, bank dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan aman kepada seluruh nasabah dengan sistem yang terintegrasi, baik melalui kantor bank, agen bank, ATM, telepon, dan internet.

**Perkembangan teknologi digital menuntut sektor jasa keuangan menyediakan layanan baru dalam bentuk aplikasi digital.**

Dengan adanya perkembangan teknologi digital, konsumen dapat mengakses layanan jasa keuangan melalui aplikasi digital.

Di sisi lain, penggunaan aplikasi digital secara tidak langsung akan memengaruhi kebutuhan kantor cabang bank. Hal ini terlihat dari jumlah kantor cabang bank yang semakin menurun sejak tahun 2016 (Grafik 1.2).

Gambar 1.3 Peran Penting Aplikasi Digital



Grafik 1.2 Jumlah Kantor Bank Umum  
Sumber: OJK (2020)



## BAB 1 LATAR BELAKANG



↓ BERKURANG

1.	Operator Entri Data
2.	Staf Penggajian, Pembukuan, dan Akuntan
3.	Sekretaris Eksekutif dan Administrasi
4.	Akuntan dan Auditor
5.	Staf Pelayanan dan Informasi Pelanggan
6.	Kasir Bank dan Staf Terkait
7.	Staf Statistik, Keuangan, dan Asuransi
8.	<i>Underwriter</i> Asuransi
9.	Manajer Operasional dan Umum
10.	Analisis Keuangan

(\*) semakin ke atas semakin menurun kebutuhannya

BERTAMBAH ↑



1.	Analisis Data dan <i>Scientist</i>
2.	Spesialis <i>Big Data</i>
3.	Spesialis Strategi dan Pemasaran Digital
4.	Spesialis AI dan <i>Machine Learning</i>
5.	Spesialis Transformasi Digital
6.	Analisis Keamanan Informasi
7.	Ahli <i>Database</i> dan Jaringan
8.	Ahli Pengembangan Bisnis
9.	<i>Fintech Engineer</i>
10.	Spesialis Keamanan Siber

(\*) semakin ke atas semakin meningkat kebutuhannya

**Gambar 1.4** Perubahan Kebutuhan Profesi pada Industri Jasa Keuangan  
Sumber: WEF (2020)

Adopsi teknologi digital mengakibatkan terjadinya perubahan kebutuhan profesi pada sektor jasa keuangan. Beberapa profesi yang bersifat manual akan semakin berkurang kebutuhannya, sebaliknya akan muncul beberapa profesi baru yang sebelumnya tidak ada.

**“ Program pengembangan SDM di sektor jasa keuangan harus mengantisipasi kemungkinan munculnya profesi-profesi baru. ”**



## 1.2 TATA KELOLA, RISIKO, DAN KEPATUHAN

### TATA KELOLA

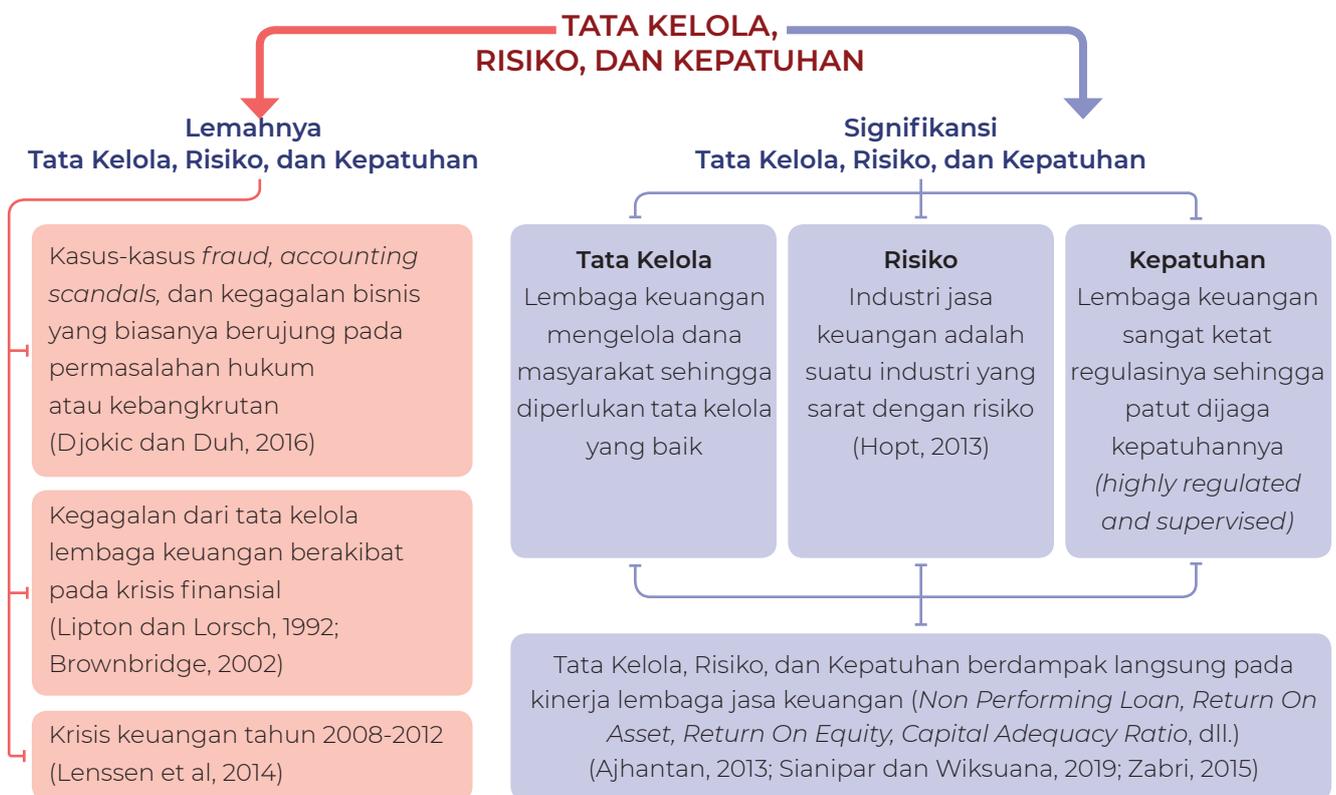
Tata kelola perusahaan merupakan sistem yang terdiri dari proses, kebijakan, dan aturan dalam mengelola perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, independen, dan *fairness* (kewajaran dan kesetaraan). Bagi sektor jasa keuangan, tata kelola manajemen yang baik memengaruhi kinerja perusahaan.

### RISIKO

Kegiatan usaha lembaga keuangan sangat rentan dengan berbagai risiko baik risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas maupun risiko-risiko lainnya. Untuk dapat mengelola risiko-risiko tersebut, diperlukan kemampuan SDM yang mumpuni.

### KEPATUHAN

Sektor jasa keuangan merupakan industri yang memiliki ekosistem regulasi yang ketat (*highly regulated*). Ekosistem regulasi yang ketat tersebut diperlukan untuk menciptakan sektor jasa keuangan yang sehat, stabil, dan mampu tumbuh secara berkelanjutan.



Gambar 1.5 Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan  
Sumber: IBI (2017)



## BAB 1 LATAR BELAKANG

Penerapan Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan atau yang juga dikenal dengan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) merupakan aspek yang menjadi perhatian besar dalam proses bisnis di industri sektor jasa keuangan. Pentingnya GRC tersebut untuk memastikan bahwa sektor jasa keuangan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik dan mampu menjaga kepercayaan pasar.

**“ Untuk memastikan penerapan GRC berjalan dengan baik, maka diperlukan SDM berkualitas, berkompeten, dan berintegritas. ”**

OJK telah bekerjasama dengan GRC Forum Indonesia pada tahun 2020 untuk menyusun Buku Panduan Mencapai Model Keunggulan GRC untuk menjawab permasalahan klasik penerapan GRC di Indonesia yang mencakup prinsip, kerangka kerja, *maturity model*, dan *assessment tools*, sehingga diharapkan dapat mempermudah upaya untuk bersama-sama menerapkan GRC terintegrasi di masing-masing organisasi khususnya lembaga jasa keuangan (Gambar 1.6).

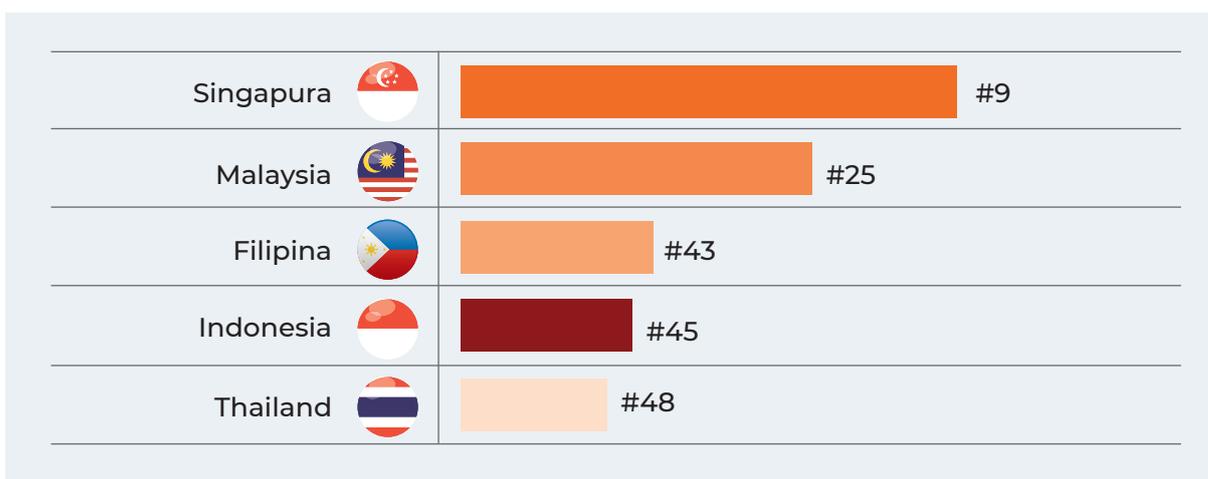


**Gambar 1.6** Interaksi Model Keunggulan GRC  
Sumber: OJK dan GRC Forum Indonesia 2020

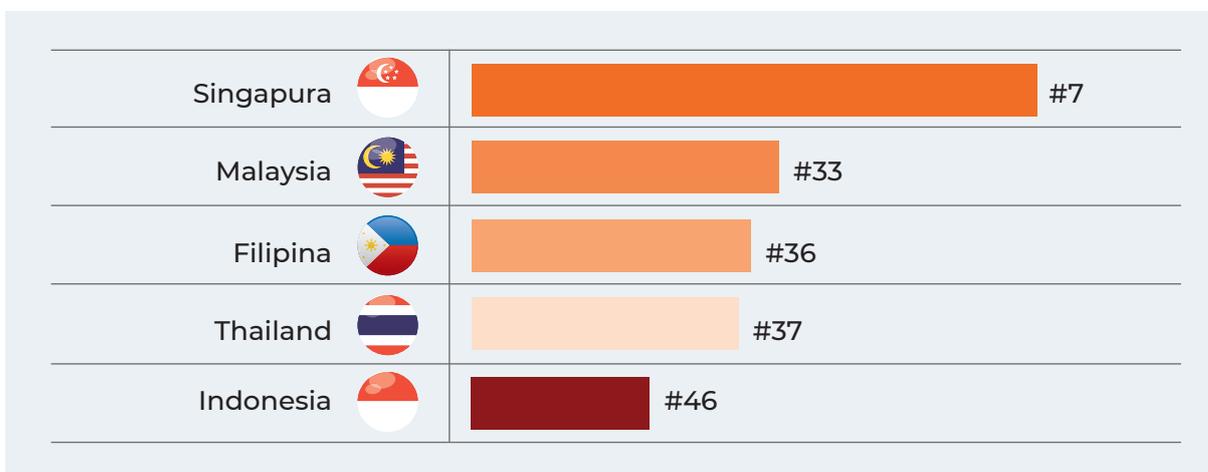


## 1.3 KESENJANGAN KOMPETENSI

Menurut hasil kajian Institute of Management Development, pada World Talent Ranking 2020, Indonesia berada pada peringkat ke-45 dari total 63 negara (Grafik 1.3). Dari peringkat tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura (9), Malaysia (25), dan Thailand (43). Dalam hal kemampuan *finance skills*, posisi Indonesia juga tertinggal dari negara-negara tersebut (Grafik 1.4).



**Grafik 1.3** Lima Peringkat Teratas Negara ASEAN pada World Talent Ranking 2020  
Sumber: IMD World Talent Ranking, diolah (2020)



**Grafik 1.4** Lima Peringkat Teratas Negara ASEAN pada Finance Skills Ranking 2020  
Sumber: IMD World Talent Ranking, diolah (2020)



### “ Potensi Indonesia menjadi *big emerging market* perlu didukung oleh SDM yang kompeten dan profesional, termasuk SDM di sektor jasa keuangan. ”

Berdasarkan proyeksi PricewaterhouseCoopers (2017), Indonesia akan menduduki peringkat ke-5 ekonomi dunia pada tahun 2030, sedangkan Standard Chartered (2019) memproyeksikan Indonesia berada di peringkat ke-4 pada tahun yang sama (Tabel 1.1). Kedua proyeksi tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia akan menjadi *big emerging market* dengan perekonomian terkuat di Asia Tenggara.



**Tabel 1.1** Proyeksi Peringkat Indonesia di Ekonomi Dunia pada Tahun 2030

Urutan ke	Negara	Proyeksi GDP terhadap PPP
#1	Cina	\$38,0 triliun
#2	Amerika Serikat	\$23,5 triliun
#3	India	\$19,5 triliun
#4	Jepang	\$5,6 triliun
#5	Indonesia	\$5,4 triliun
#6	Rusia	\$4,7 triliun
#7	Jerman	\$4,7 triliun
#8	Brazil	\$4,4 triliun
#9	Meksiko	\$3,7 triliun
#10	Inggris	\$3,6 triliun

Sumber: PWC (2017)

Urutan ke	Negara	Proyeksi GDP terhadap PPP
#1	Cina	\$64,2 triliun
#2	India	\$46,3 triliun
#3	Amerika Serikat	\$31,0 triliun
#4	Indonesia	\$10,1 triliun
#5	Turki	\$9,1 triliun
#6	Brazil	\$8,6 triliun
#7	Mesir	\$8,2 triliun
#8	Rusia	\$7,9 triliun
#9	Jepang	\$7,2 triliun
#10	Jerman	\$6,9 triliun

Sumber: Standard Chartered (2019)

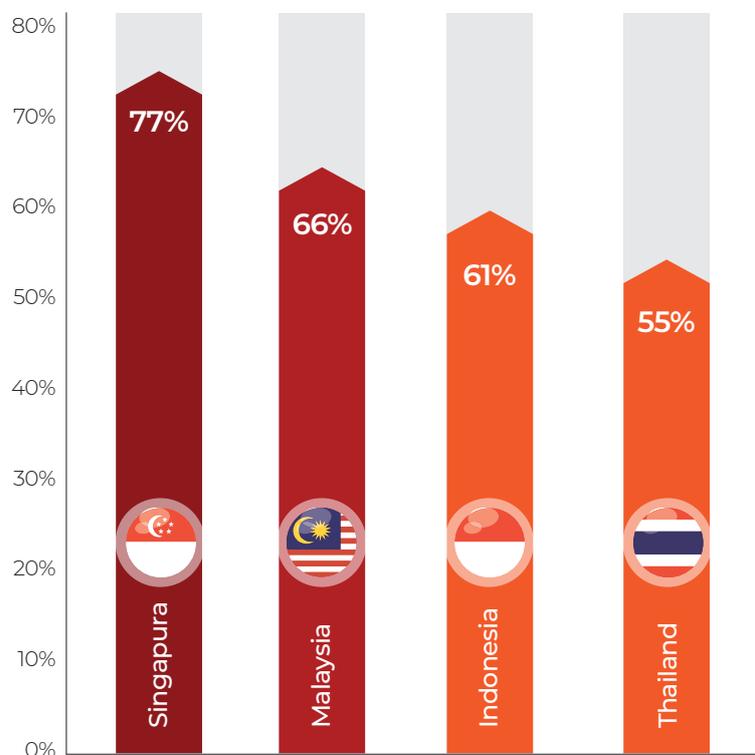


SDM yang memiliki keterampilan digital (*digital skills*) sangat dibutuhkan oleh sektor jasa keuangan, tidak hanya mendukung keberlangsungan kegiatan usaha industri jasa keuangan, namun diharapkan juga mampu mempercepat transformasi digital.

Laporan dari World Economic Forum (2020) menunjukkan bahwa keterampilan digital di Indonesia (61%) masih tertinggal dibandingkan dengan Singapura (77%) dan Malaysia (66%) (Grafik 1.5).



**“ Pengembangan keterampilan digital harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar SDM sektor jasa keuangan memiliki daya saing global. ”**



**Grafik 1.5** Indeks Keterampilan Digital pada Populasi Aktif

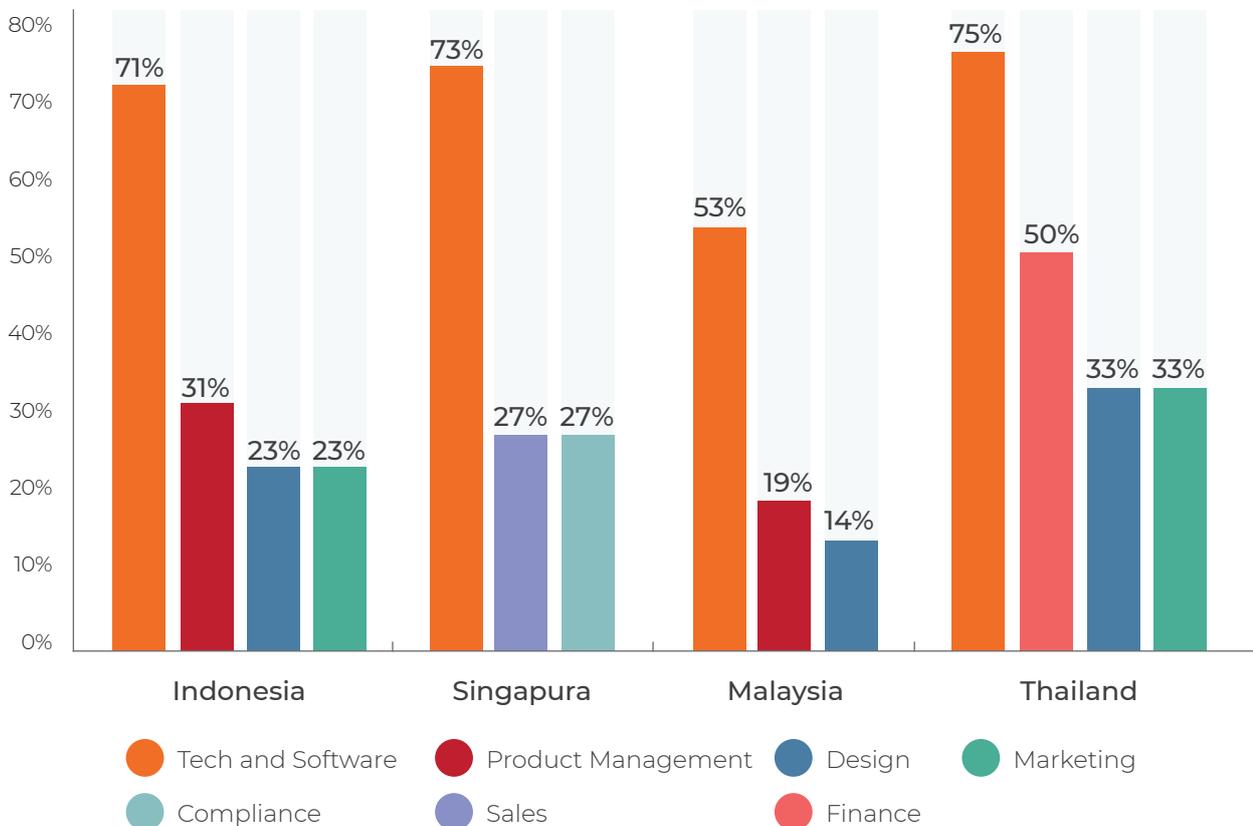


## BAB 1 LATAR BELAKANG

Sebuah survei yang dilakukan oleh Ernst & Young (2018) menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kekurangan SDM yang memiliki kompetensi di bidang *technology and software* (71%) (Grafik 1.6). Selain itu, lebih dari 90% responden perusahaan di Indonesia menganggap bahwa *talent reforms* sebagai inisiatif yang penting untuk dilakukan guna memenuhi *gap* kebutuhan.



**Perlu dilakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan kompetensi SDM di bidang teknologi digital melalui pengembangan SDM sektor jasa keuangan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.**



**Grafik 1.6** Kekurangan Ketersediaan SDM Berdasarkan Bidang  
Sumber: EY (2018)



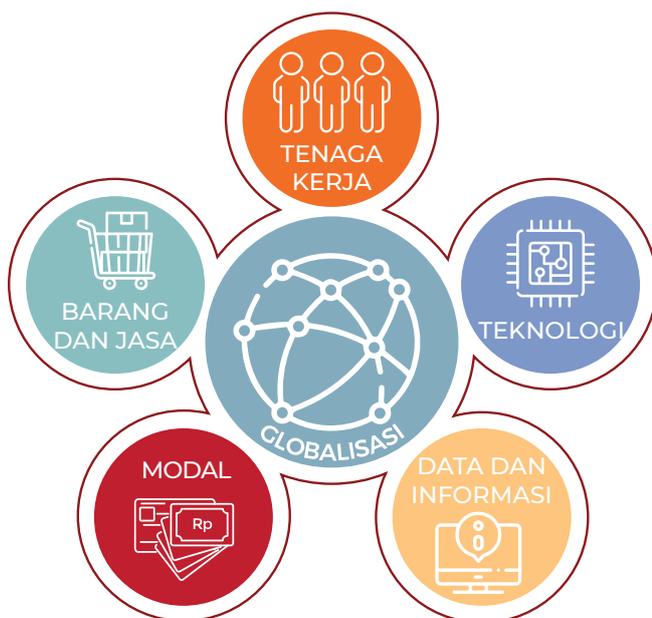
## 1.4 KONDISI GLOBAL

**Globalisasi** telah membuka aliran barang/ jasa, modal, teknologi, data, dan tenaga kerja sehingga mempermudah proses keluar/masuk dari dan/atau ke dalam suatu negara.

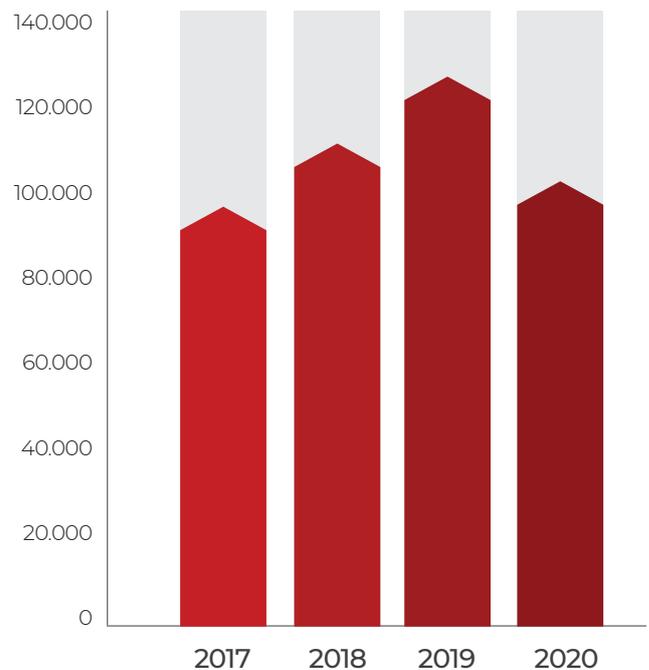
Salah satu yang menjadi fokus perhatian adalah kemudahan pergerakan tenaga kerja dari satu

negara ke negara lainnya. Hal ini menyebabkan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia cukup tinggi jumlahnya, hingga mencapai angka 101.150 di tahun 2020 (Grafik 1.7). Mobilitas tenaga kerja yang tinggi menyebabkan persaingan tenaga kerja yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri menjadi sangat kompetitif.

**“ Pengembangan kompetensi SDM sektor jasa keuangan harus menjadi prioritas untuk menciptakan kualitas SDM yang berdaya saing global. ”**



Gambar 1.7 Faktor-Faktor Globalisasi



Grafik 1.7 Tenaga Kerja Asing di Indonesia  
Sumber: Kemnaker (2021)

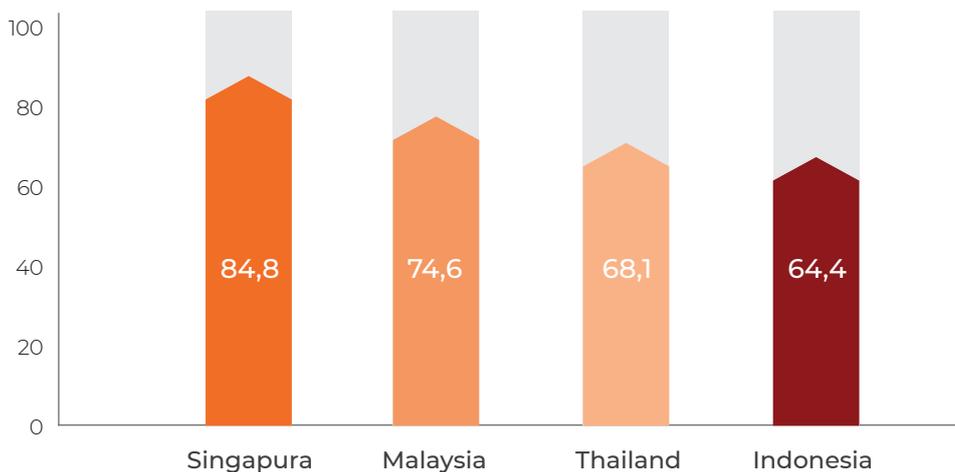


## BAB 1 LATAR BELAKANG

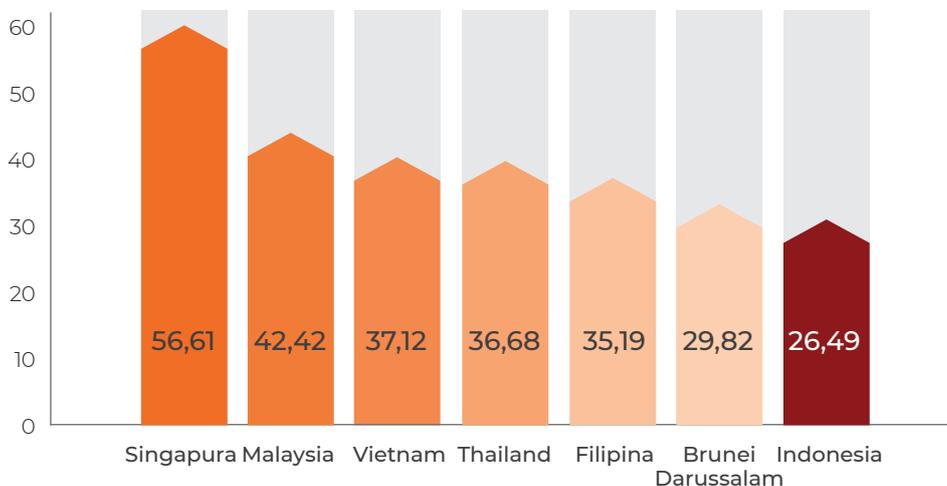
Berdasarkan The Global Competitiveness Index Report 2019, Indonesia berada di peringkat ke-50 dari 141 negara di dunia dengan skor 64,4 (Grafik 1.8). Salah satu faktor yang memengaruhi adalah keterampilan tenaga kerja Indonesia yang masih rendah.

Menurut Global Innovation Index tahun 2020, Indonesia berada di peringkat ke-85 dari 131 negara di dunia dengan skor 26,49 (Grafik 1.9). Salah satu pilar yang memengaruhi skor ini, yakni kualitas SDM dan riset Indonesia yang rendah.

**Indonesia harus memprioritaskan peningkatan kualitas SDM melalui pengembangan keterampilan dan riset khususnya di sektor jasa keuangan agar memiliki daya saing regional dan global.**



**Grafik 1.8** Global Competitiveness Index Tahun 2019  
Sumber: WEF (2019)



**Grafik 1.9** Global Innovation Index Tahun 2020  
Sumber: WIPO (2020)



**Gambar 1.8** Ekosistem Keuangan Berkelanjutan Indonesia  
Sumber: OJK (2021)

Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025), yang diterbitkan oleh OJK, mengintegrasikan tujuh komponen dalam satu kesatuan ekosistem keuangan berkelanjutan. SDM menjadi faktor penting dalam mendukung penyaluran pembiayaan kepada perusahaan yang telah memperhitungkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST).

**“ Diperlukan peningkatan kapasitas SDM melalui program pengembangan SDM sektor jasa keuangan dalam rangka mendukung keuangan berkelanjutan. ”**

**Tabel 1.2** Peluang Investasi, Lapangan Kerja, dan Pengurangan Emisi Karbon

GREEN RECOVERY ACROSS KEY SECTORS	EUROPE (RUSSIA, SERBIA, TURKEY, UKRAINE)	EAST ASIA AND THE PACIFIC (CHINA, INDONESIA, PHILIPPINES, VIETNAM)	SOUTH ASIA (BANGLADESH, INDIA)	LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN (ARGENTINA, BRAZIL, COLOMBIA, MEXICO)	MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA (EGYPT, JORDAN, MOROCCO)	SUB-SAHARAN AFRICA (EGYPT, JORDAN, MOROCCO)	TOTAL
INVESTMENT OPPORTUNITY	\$0.6 TRILLION	\$5.1 TRILLION	\$2.8 TRILLION	\$1.3 TRILLION	\$0.2 TRILLION	\$0.3 TRILLION	\$10.2 TRILLION
NEW DIRECT JOBS	16.8 MILLION	98.8 MILLION	53.2 MILLION	27.1 MILLION	4.2 MILLION	13.3 MILLION	213.4 MILLION
GHG EMISSIONS REDUCTION (CO <sub>2</sub> e)	324.7 MILLION TONS	2,010.7 MILLION TONS	861.6 MILLION TONS	351.5 MILLION TONS	111.7 MILLION TONS	153.8 MILLION TONS	4.0 BILLION TONS

Sumber: IFC (2021)

**Tabel 1.3** Sustainable Banking Assessment 2020

1	Jepang
2	Korea
3	Indonesia
4	Malaysia
5	Filipina
6	Singapura
7	Thailand
8	Vietnam

Sumber: WWF (2020)

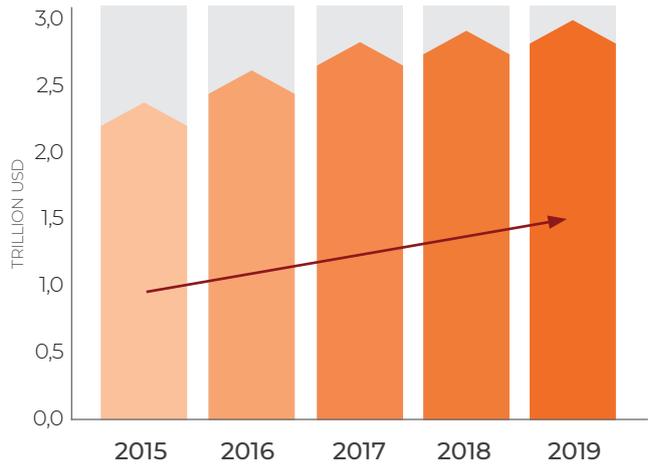
Berdasarkan International Finance Corporation Report (2021), Indonesia bersama dengan Cina, Filipina, dan Vietnam memiliki potensi yang besar dalam menciptakan peluang investasi dan lapangan kerja baru, serta pengurangan emisi karbon apabila LST diterapkan. Hal ini

didukung oleh data dari World Wide Fund for Nature, Sustainable Banking Assessment 2020, yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-3 dari 8 negara yang telah memiliki bank dengan penyaluran pembiayaan yang memperhatikan aspek LST untuk mendukung keuangan yang berkelanjutan.



## 1.5 POTENSI EKONOMI SYARIAH

Dalam 5 tahun terakhir, aset keuangan syariah menunjukkan tren peningkatan yang positif. Data menunjukkan hingga tahun 2019 aset keuangan syariah telah mencapai US\$2,88 triliun (Grafik 1.10). Global Islamic Economy Indicator Report 2020/21 memproyeksikan aset keuangan syariah dapat meningkat hingga US\$3,69 triliun di tahun 2024.



Grafik 1.10 Aset Keuangan Syariah Global  
Sumber: GIEI Report, diolah (2020)

**” Potensi Indonesia yang besar dalam perekonomian syariah perlu didukung oleh peningkatan kualitas SDM agar mampu menghasilkan berbagai inovasi produk dan pelayanan keuangan syariah. ”**

Berdasarkan GIEI Report 2020/21, Indonesia menduduki peringkat ke-4 dari 81 negara (Tabel 1.4). Peringkat ini memperhatikan beberapa faktor diantaranya *islamic finance, halal food, muslim-friendly travel, modest fashion, pharmaceuticals and cosmetics, media and recreation*.

Tabel 1.4 Top 10 Global Islamic Economy Indicator Score Rank and By Islamic Finance

### TOP 10 Global Islamic Economy Indicator Score Rank

1	Malaysia
2	Saudi Arabia
3	UAE
4	Indonesia
5	Jordan
6	Bahrain
7	Kuwait
8	Pakistan
9	Iran
10	Qatar

### TOP 10 Indicator Score Rank by Islamic Finance

1	Malaysia
2	Saudi Arabia
3	UAE
4	Jordan
5	Bahrain
4	Indonesia
7	Kuwait
8	Pakistan
9	Qatar
10	Nigeria

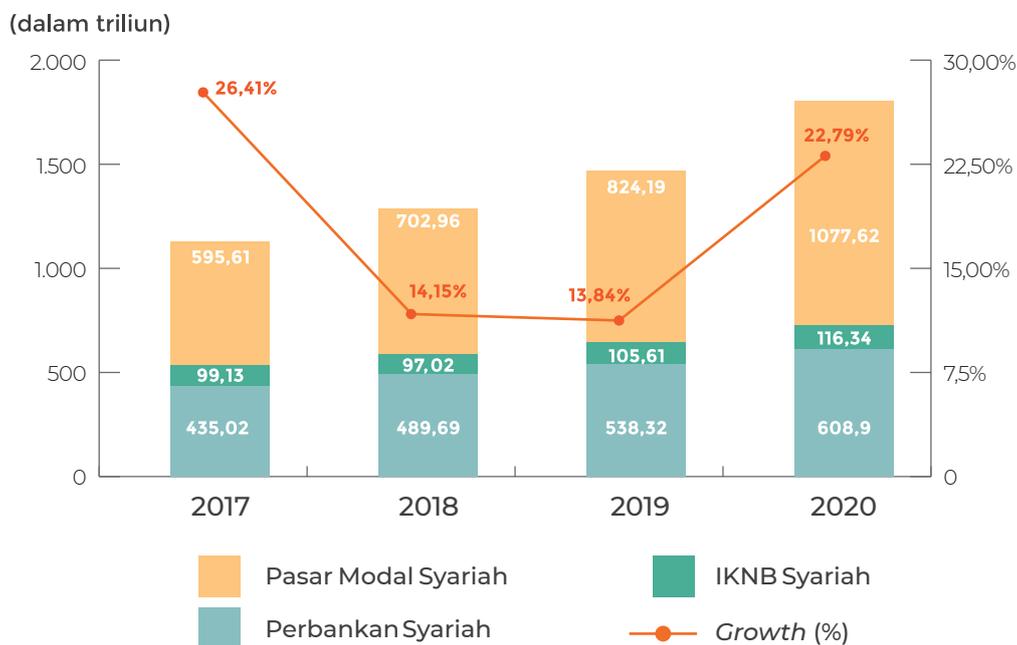
Sumber: GIEI Report (2020)



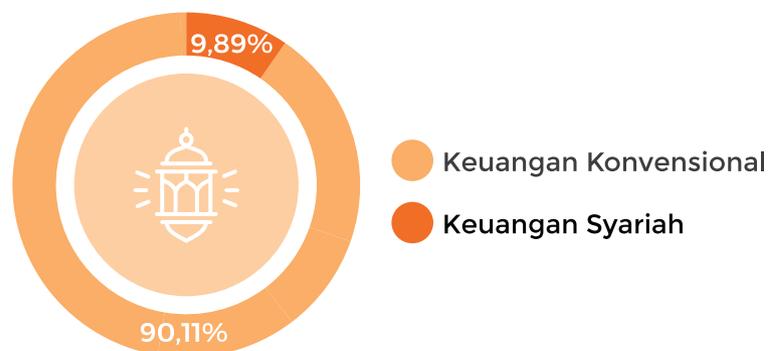
Hingga Desember 2020, Indonesia telah mencatatkan nilai aset keuangan sebesar Rp1.802,86 triliun atau naik 22,79% secara *year on year* (Grafik 1.11).

Sementara dari sisi *market share* keuangan syariah terhadap sistem keuangan di Indonesia mengalami peningkatan menjadi sebesar 9,89% (Grafik 1.12). Potensi yang besar ini harus terus dioptimalkan.

**“Guna mencapai *market share* keuangan syariah di atas 10% perlu dilakukan pengembangan SDM di bidang keuangan syariah secara berkelanjutan bersama dengan DSN-MUI.”**



**Grafik 1.11** Total Aset Keuangan Syariah  
Sumber: OJK (2020)



**Grafik 1.12** Market Share Keuangan Syariah  
Sumber: OJK (2020)



# BAB 1 LATAR BELAKANG

## SKALA USAHA EKONOMI SYARIAH

- ◆ Belum ada pengukuran skala usaha ekonomi syariah yang spesifik dan menjadi acuan nasional.
- ◆ Pangsa pasar syariah 9,27%.

## PERINGKAT ISLAMIC ECONOMIC INDEX GLOBAL DAN NASIONAL

- ◆ Peringkat 4 dari 81 negara GIEI.
- ◆ Belum ada Indeks Ekonomi Syariah nasional.



## EKONOMI MANDIRI

- ◆ Belum ada pengukuran terhadap komponen industri halal dalam PDB Indonesia (PDB syariah).
- ◆ Belum ada pengukuran yang spesifik.

## INDEKS KESEJAHTERAAN

- ◆ Belum ada Indeks Maqasid Syariah nasional dan internasional.

Gambar 1.9. Kondisi Ekonomi Syariah Saat Ini  
Sumber: Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

Potensi besar ekonomi syariah harus dioptimalkan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. SDM yang kompeten menjadi kunci utama untuk mencapai target tersebut.

**” Pengembangan SDM sektor jasa keuangan syariah menjadi penggerak dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah nasional. ”**

## SKALA USAHA EKONOMI SYARIAH

- ◆ Skala usaha ekonomi syariah naik 100% dalam 5 tahun.
- ◆ Pangsa pasar syariah mencapai 20% dalam 5 tahun.

## PERINGKAT ISLAMIC ECONOMIC INDEX GLOBAL DAN NASIONAL

- ◆ Peringkat 5 besar GIEI.
- ◆ Indeks Ekonomi Syariah nasional yang memuaskan.



## EKONOMI MANDIRI

- ◆ *Share* ekspor industri halal terhadap PDB naik 100% dalam 10 tahun.
- ◆ Peningkatan swasembada pangan dan energi melalui *share* impor industri pangan dan energi turun 25% dalam 10 tahun.

## INDEKS KESEJAHTERAAN

- ◆ Membangun Indeks Maqasid Syariah nasional dan internasional.
- ◆ Meningkatkan skor/kinerja dalam Indeks Maqasid Syariah nasional dan internasional.

Gambar 1.10 Target Ekonomi Syariah Tahun 2024  
Sumber: Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024



## 1.6 PERLINDUNGAN KONSUMEN

**Perlindungan konsumen** merupakan salah satu aspek penting dalam rangka meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap industri jasa keuangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi industri jasa keuangan untuk memastikan bahwa

pelayanan yang diberikan kepada konsumen harus adil dan transparan. Namun demikian, jumlah pengaduan konsumen hingga bulan November tahun 2020 memperlihatkan tren yang meningkat (Grafik 1.13).

**“Pengembangan SDM sektor jasa keuangan menjadi salah satu faktor penting guna meningkatkan kompetensi dan pemahaman produk jasa keuangan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang mengedepankan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.”**



**Grafik 1.13** Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan  
Sumber: OJK (2020)

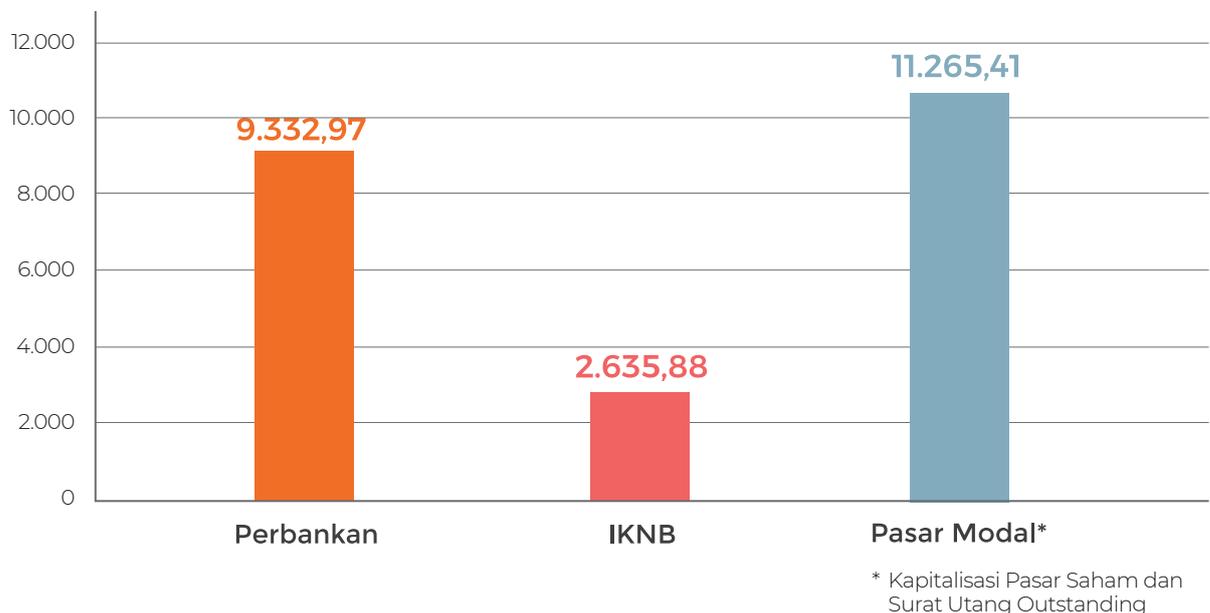


## 1.7 SEKTOR STRATEGIS

**Industri jasa keuangan** merupakan sektor yang sangat strategis mengingat dana masyarakat yang dikelola sangat besar. Per bulan Desember 2020, dana masyarakat yang dikelola di industri jasa keuangan telah mencapai Rp23.234 triliun (Grafik 1.14).

Mengingat strategisnya industri jasa keuangan maka aspek SDM menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa dana-dana masyarakat tersimpan dan dikelola dengan baik dan akuntabel.

**“ Sektor jasa keuangan merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga pengembangan SDM sektor jasa keuangan menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan. ”**



**Grafik 1.14** Total Aset Perbankan, IKNB, dan Kapitalisasi Pasar Modal  
Sumber: OJK (2020)



Tabel 1.5 Jumlah Pelaku Usaha Sektor Jasa Keuangan

Total Pelaku Usaha Sektor Jasa Keuangan	Tahun		
	2018	2019	2020
Perbankan (Bank Umum dan BPR)	1.712	1.655	1.615
IKNB	1.181	1.330	1.329
Lembaga dan Profesi Pasar Modal	45.746	40.752	48.386
TOTAL	48.639	43.737	51.330

Sumber: OJK (2020)

Pelaku Usaha Jasa Keuangan saat ini berjumlah 51.330 dengan ukuran dan kompleksitas usaha yang berbeda-beda. Namun demikian, diharapkan kualitas SDM di masing-masing lembaga jasa keuangan memiliki tingkat kompetensi yang memadai sesuai dengan standar kompetensi.

**” Penyusunan cetak biru pengembangan SDM di sektor jasa keuangan akan menjadi pedoman standar penyetaraan kualitas SDM. ”**



## BAB 1 LATAR BELAKANG

Kontribusi sektor jasa keuangan dan asuransi terhadap penerimaan pajak negara relatif besar, yaitu 15,8% per Mei 2020 (Gambar 1.11) dari total penerimaan pajak. Oleh karena itu, keberlangsungan sektor jasa keuangan dan asuransi harus tetap dipertahankan dengan memperkuat kualitas SDM-nya.

Sektor jasa keuangan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, melalui penyaluran kredit perbankan pada 17 sektor usaha (Tabel 1.6). Sektor usaha mulai dari perdagangan besar dan eceran sampai dengan pengelolaan air dan sampah, serta jasa lain telah mendapatkan pembiayaan guna mendukung kegiatan usaha di sektor-sektor tersebut.



Gambar 1.11 Realisasi Penerimaan Pajak dan Kontribusinya  
Sumber: Kemenkeu (2020)

**“Mengingat pentingnya peran sektor jasa keuangan dalam mendukung perekonomian nasional, diperlukan pengembangan kompetensi SDM secara holistik.”**

Tabel 1.6 Aliran Kredit ke 17 Sektor Usaha

Aliran kredit ke 17 sektor usaha	Total kredit (Rp4,01 ribu triliun)					
	JAN 2020*	FEB 2020*	MAR 2020*	APR 2020*	MEI 2020*	JUN 2020*
Perdagangan besar dan eceran	987	986	1.009	987	972	964
Industri pengolahan	881	893	949	918	916	899
Konstruksi	355	355	359	360	364	369
Jasa keuangan	297	301	325	320	312	305
Listrik dan gas	191	193	208	205	207	207
Real estate	166	167	171	170	171	172
Transportasi dan pergudangan	156	157	162	158	157	158
Pertambangan	125	125	140	134	138	139
Akomodasi dan makan minum	112	114	116	115	115	115
Informasi dan komunikasi	99	99	101	100	101	108
Pertanian	98	100	103	104	103	100
Jasa perusahaan	94	94	97	95	92	87
Jasa kesehatan	29	28	29	29	28	29
Administrasi pemerintahan	23	23	24	23	24	23
Jasa pendidikan	14	14	14	14	14	15
Pengelolaan air dan sampah	6	6	6	6	6	6
Jasa lain	377	382	390	384	397	389

Sumber: Lokadata (2020)

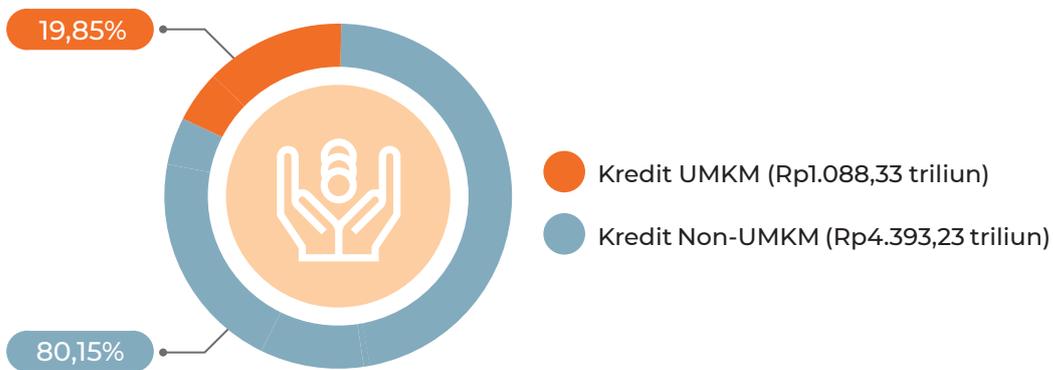
\* dalam triliun



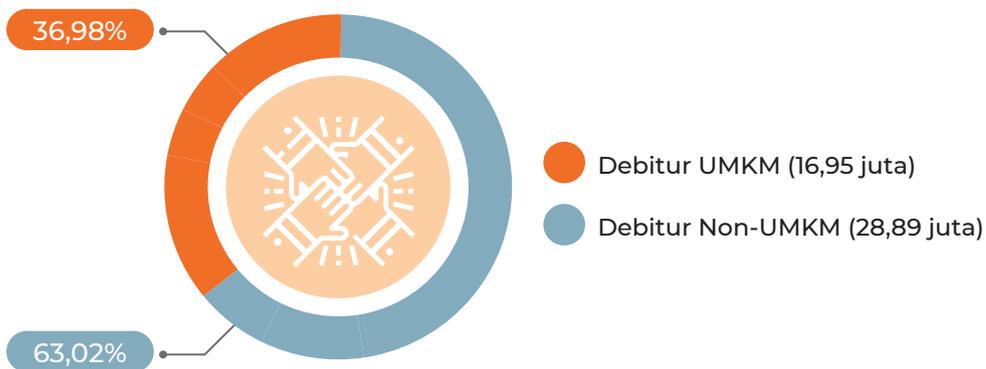
**PERAN PENTING PERBANKAN BAGI PEREKONOMIAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi besar terhadap PDB Indonesia. Industri perbankan memiliki peran yang strategis dalam mendukung kegiatan usaha, baik di sektor UMKM maupun non-UMKM. Sampai dengan Desember 2020 total penyaluran kredit perbankan mencapai Rp5.481,56 triliun, dimana Rp1.088,33 triliun (19,85%) disalurkan kepada debitur UMKM (Grafik 1.15) yang jumlahnya mencapai 16,95 juta debitur UMKM (Grafik 1.16).

**“ Pengembangan kualitas SDM yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha UMKM dan non-UMKM. ”**



**Grafik 1.15** Penyaluran Kredit UMKM terhadap Total Penyaluran Kredit Perbankan  
Sumber: OJK (2020)



**Grafik 1.16** Persentase Debitur UMKM terhadap Total Debitur Perbankan  
Sumber: OJK (2020)

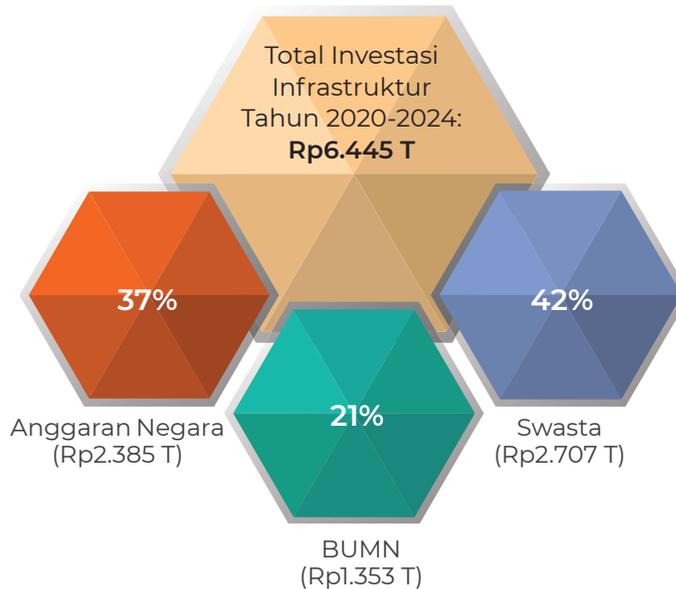


## BAB 1 LATAR BELAKANG

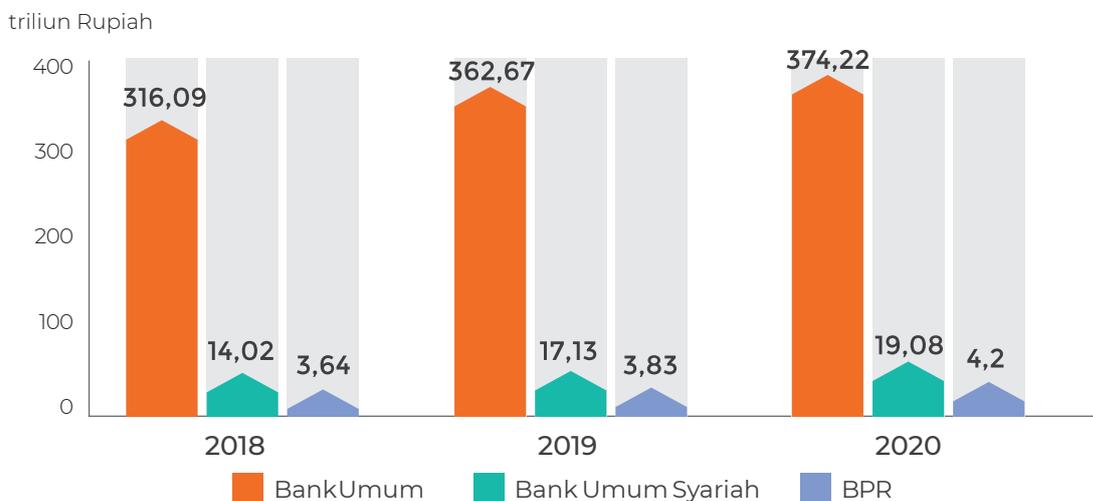
Berdasarkan data Bappenas (2019), kebutuhan pendanaan infrastruktur selama lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 relatif sangat besar yaitu Rp6.445 triliun (Gambar 1.12).

Guna mendukung pemerintah dalam pembangunan infrastruktur tersebut, sektor jasa keuangan selalu berkontribusi melalui penyaluran kredit infrastruktur di Indonesia.

**” Pembangunan SDM sektor jasa keuangan yang berkualitas akan menghasilkan terobosan-terobosan baru dalam berbagai skema dan/atau alternatif pembiayaan. ”**



**Gambar 1.12** Pembiayaan Infrastruktur  
Sumber: Bappenas (2019)



**Grafik 1.17** Kredit Konstruksi di Perbankan  
Sumber: OJK (2020)



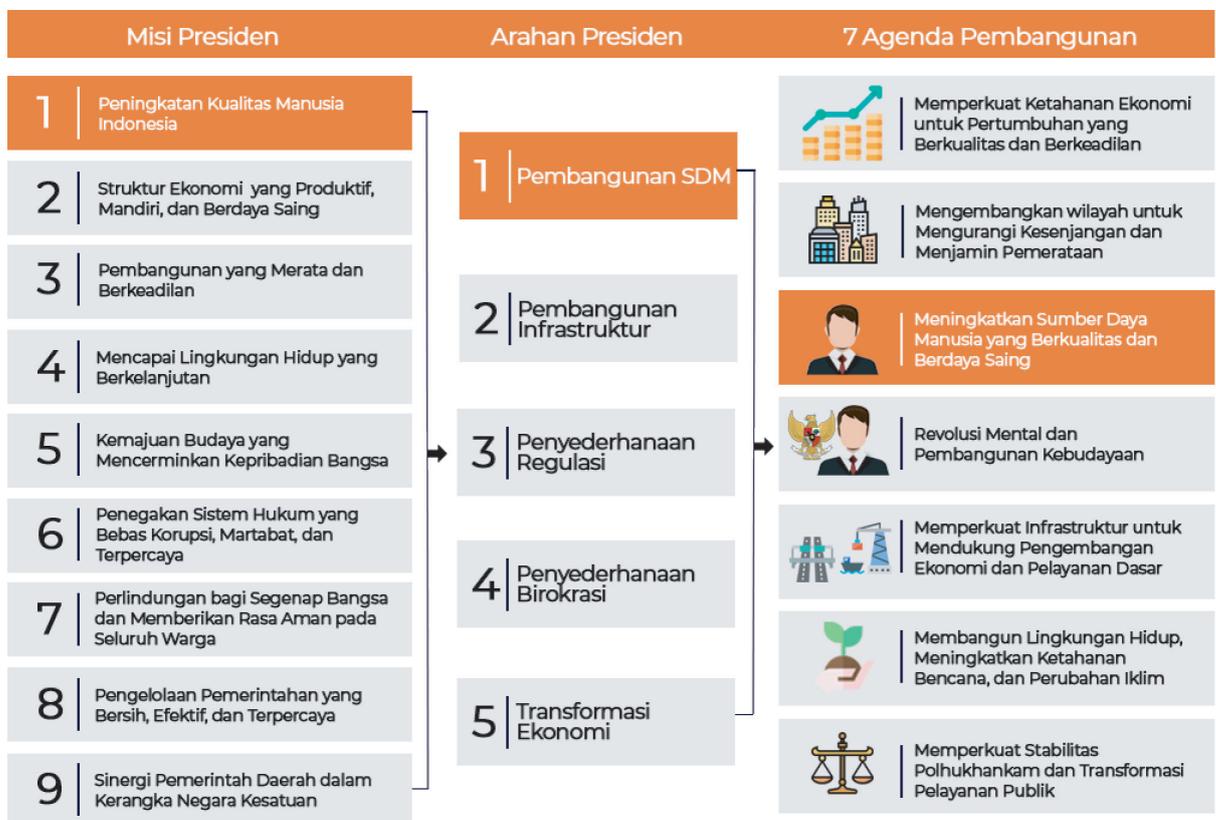
## 1.8 PERLUNYA ARAH PENGEMBANGAN SDM SEKTOR JASA KEUANGAN

### Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024,

Presiden telah menekankan pentingnya peningkatan kualitas manusia Indonesia dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi guna mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Oleh karena itu, sektor jasa keuangan perlu mendukung upaya Presiden tersebut dengan mengembangkan SDM di sektor jasa keuangan, sehingga mempunyai SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

**” Sektor jasa keuangan harus merespons kebijakan Presiden terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia dalam RPJMN 2020 - 2024 melalui program pengembangan SDM yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. ”**



Gambar 1.13 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024  
Sumber: RPJMN 2020-2024



## BAB 1 LATAR BELAKANG

### PENTINGNYA PEMBANGUNAN SDM

Dari hasil survei Media Group News (2020) mengenai persepsi tokoh publik tentang pembangunan SDM, dapat diperoleh gambaran bahwa tokoh publik bersikap optimis dengan pembangunan SDM melalui reformasi dan revitalisasi sistem pendidikan.

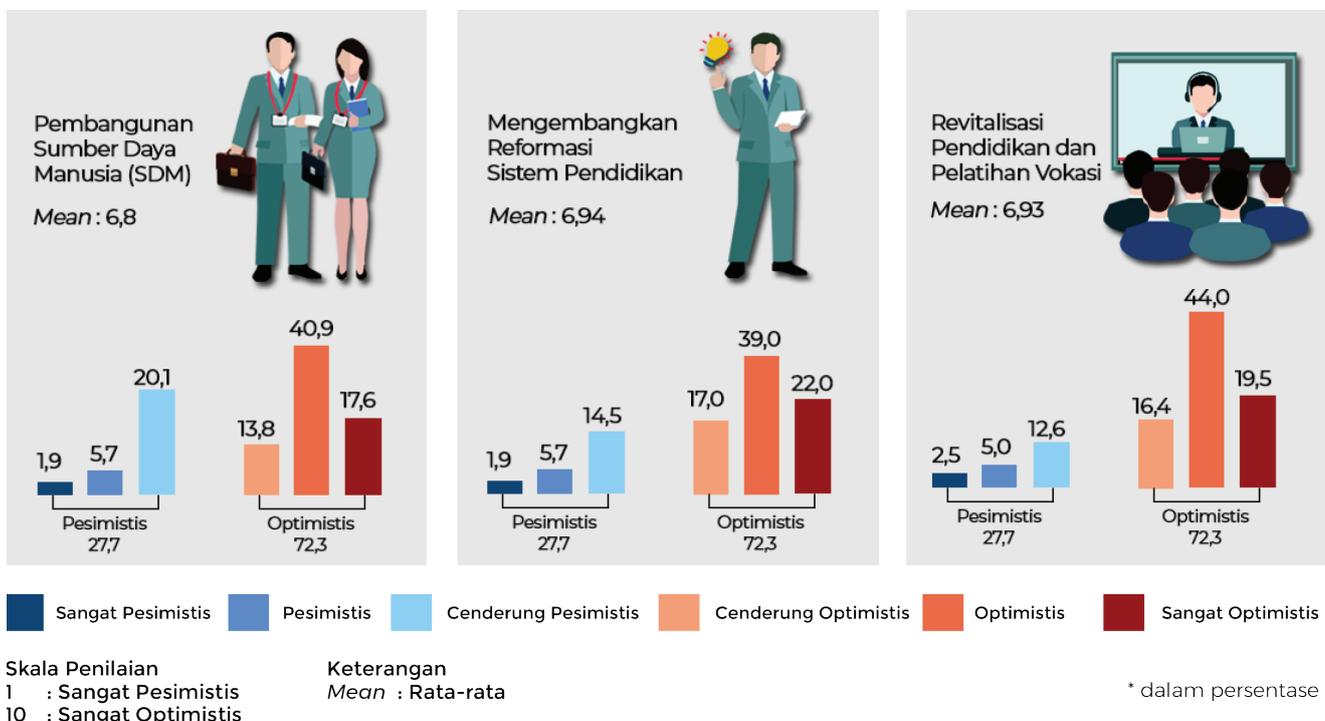
Sektor jasa keuangan juga perlu berperan aktif dalam rangka mendukung pembangunan SDM tersebut, dengan berbagai kebijakan maupun program-program pengembangan SDM.

### BELUM ADANYA CETAK BIRU PENGEMBANGAN SDM NASIONAL

Presiden Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 23 April 2019 mengenai Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif Tahun 2020 menjelaskan bahwa:

*"Prioritas utama pemerintah ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia yang terkonsolidasi dengan baik, didukung anggaran yang tepat sasaran sehingga terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui peta jalan yang jelas, terukur, dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat".*

**“Pembangunan SDM nasional memerlukan arah atau pedoman yang komprehensif. Namun demikian, saat ini belum terdapat cetak biru pengembangan SDM secara nasional, sehingga arah atau pedoman tersebut harus dituangkan ke dalam cetak biru pembangunan SDM Indonesia.”**



Grafik 1.13 Penilaian Tokoh Publik dalam Pembangunan SDM

Sumber: News Research Center Media Group News (2020)



## ARAH PENGEMBANGAN SDM DI BEBERAPA SEKTOR INDUSTRI

Beberapa kementerian dan/atau instansi telah menyusun cetak biru maupun strategi arah pengembangan SDM di sektornya masing-masing antara lain:

1. Strategi Pengembangan SDM Industri Kreatif di Indonesia oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf);
2. *Roadmap* SDM Migas oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM);
3. Rencana Aksi Pendidikan dan Pengembangan SDM Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

**” Sektor jasa keuangan belum memiliki pedoman/ arah pengembangan SDM yang terintegrasi, sehingga perlu disusun cetak biru pengembangan SDM sektor jasa keuangan yang diinisiasi OJK dan didukung asosiasi, praktisi industri, serta akademisi. ”**



**Gambar 1.14** Cetak Biru dan Strategi Arah Pengembangan SDM di Beberapa Sektor  
 Sumber: RAJM Kemenparekraf, *Blueprint* SKK Migas, dan Rencana Strategis Kemenkes



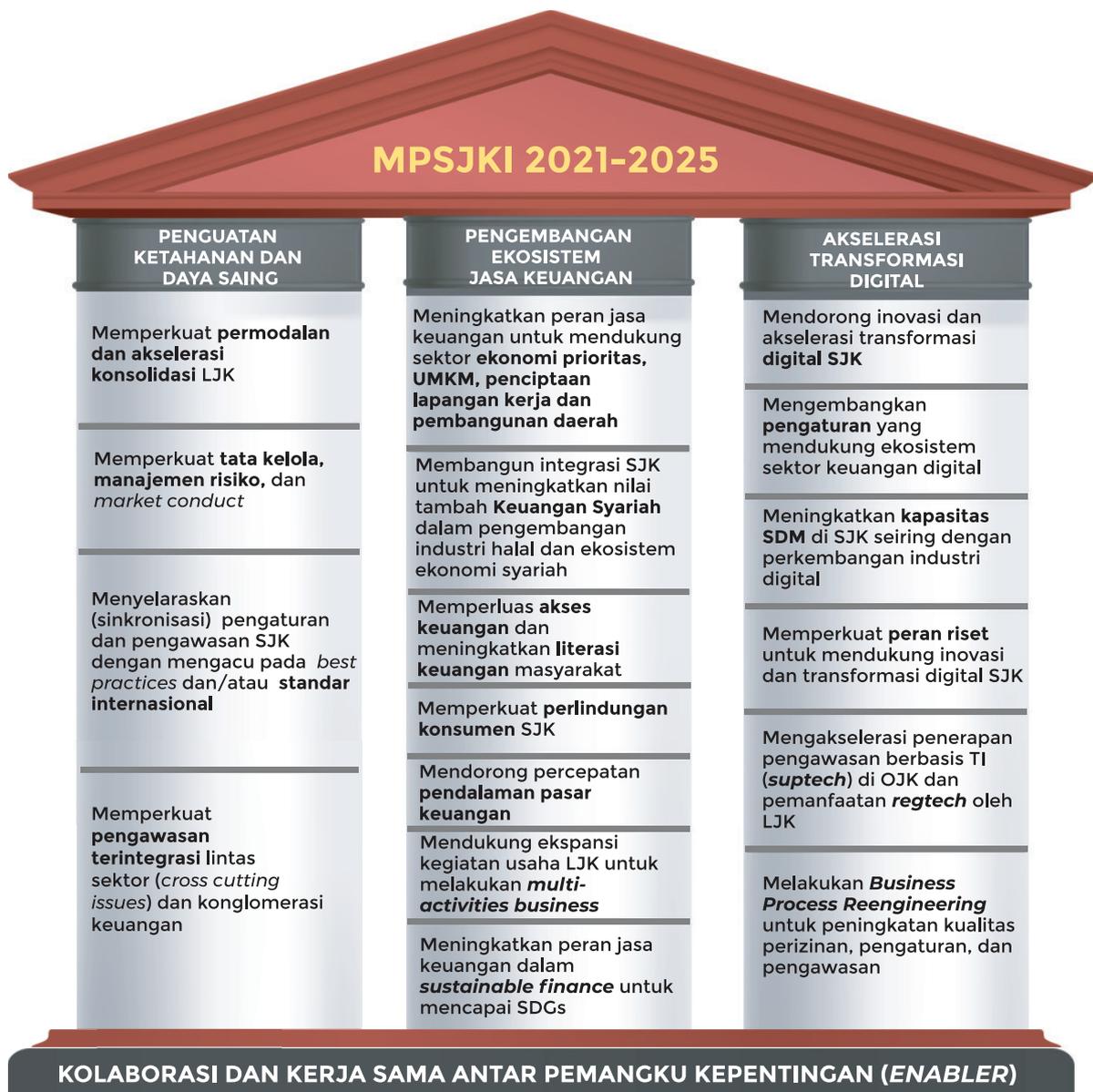
# BAB 1 LATAR BELAKANG

## MPSJKI 2021-2025

### Pilar 3: Akselerasi Transformasi Digital

Selaras dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025, dalam rangka mendukung pilar tiga terkait dengan perkembangan industri digital, maka perlu disusun program pengembangan SDM yang dikemas dalam Cetak Biru Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan.

**Cetak biru pengembangan SDM sektor jasa keuangan merupakan bagian integral dari MPSJKI 2021-2025.**



Gambar 1.15 Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025

Sumber: OJK (2021)





# BAB 2

CETAK BIRU  
PENGEMBANGAN SDM  
SEKTOR JASA KEUANGAN  
2021-2025





## 2.1 VISI DAN MISI



Gambar 2.1 Visi dan Misi Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan



## 2.2 TUJUAN



Gambar 2.2 Tujuan Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan



## 2.3 PRINSIP DASAR



Gambar 2.3 Prinsip Dasar Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan

## 2.4 SASARAN

Pengembangan SDM berfokus pada seluruh jenjang jabatan dan profesi di sektor jasa keuangan. Dengan memprioritaskan sasaran kepada seluruh jenjang jabatan dan profesi, diharapkan strategi pencapaian beserta program-programnya dapat terlaksana.



Gambar 2.4 Sasaran Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan



## 2.5 METODE PENDEKATAN

### METODE TOP DOWN

1. Regulator memberikan arahan kebijakan atau pedoman kepada industri jasa keuangan terkait arah pengembangan SDM di sektor jasa keuangan.
2. Otoritas memiliki ekspektasi atau harapan yang tinggi terhadap implementasi program pengembangan SDM di sektor jasa keuangan secara berkelanjutan.
3. Pendekatan dengan metode top down pada umumnya bertitik tolak dari perspektif bahwa arah kebijakan pengembangan SDM oleh regulator menjadi acuan untuk dilaksanakan oleh industri jasa keuangan.



Gambar 2.5 Metode Top Down

### METODE BOTTOM UP

1. Sektor jasa keuangan memiliki kebutuhan khusus terkait pengembangan SDM.
2. Ekspektasi sektor jasa keuangan terhadap regulator untuk mengeluarkan peraturan terkait pengembangan SDM di sektor jasa keuangan.
3. Pembahasan bersama perwakilan industri jasa keuangan dilaksanakan dalam rangka memperoleh masukan (a.l.: topik pelatihan), sebagai salah satu acuan dalam menyusun program pengembangan SDM.



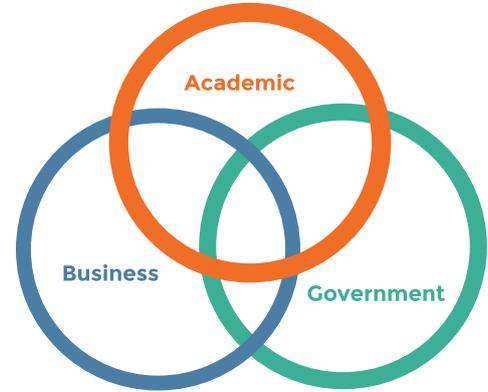
Gambar 2.6 Metode Bottom Up



### METODE TRIPLE HELIX

Dalam pengembangan SDM sektor jasa keuangan dibutuhkan sinergi yang kuat antara tiga pihak yaitu akademisi (*academic*) yang memiliki peran dalam mempersiapkan SDM sesuai kebutuhan industri jasa keuangan termasuk melakukan penelitian; pelaku bisnis (*business*) yang memiliki peran dalam mempersiapkan wadah usaha atau bisnis di sektor jasa keuangan; dan pemerintah (*government*) yang memiliki peran dalam memberikan arah kebijakan dan pedoman bagi industri jasa keuangan dalam pemenuhan SDM yang berkualitas.

**“ Oleh karena itu, dalam pengembangan SDM sektor jasa keuangan, ketiga pihak perlu berkolaborasi. ”**



Sinergi ketiga komponen tersebut di atas dikenal dengan istilah ABG (*Academic, Business, and Government*)

Gambar 2.7 Metode Triple Helix

## 2.6 TANTANGAN

Pengembangan SDM sektor jasa keuangan berpotensi menghadapi berbagai tantangan yaitu komitmen, ketersediaan anggaran, dan perubahan lanskap.



Gambar 2.8 Tantangan Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan



## 2.7 KERANGKA DASAR



Gambar 2.9 Kerangka Dasar Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan



## BAB 2 CETAK BIRU PENGEMBANGAN SDM SEKTOR JASA KEUANGAN 2021-2025

Tabel 2.1 Pembagian Peran Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan

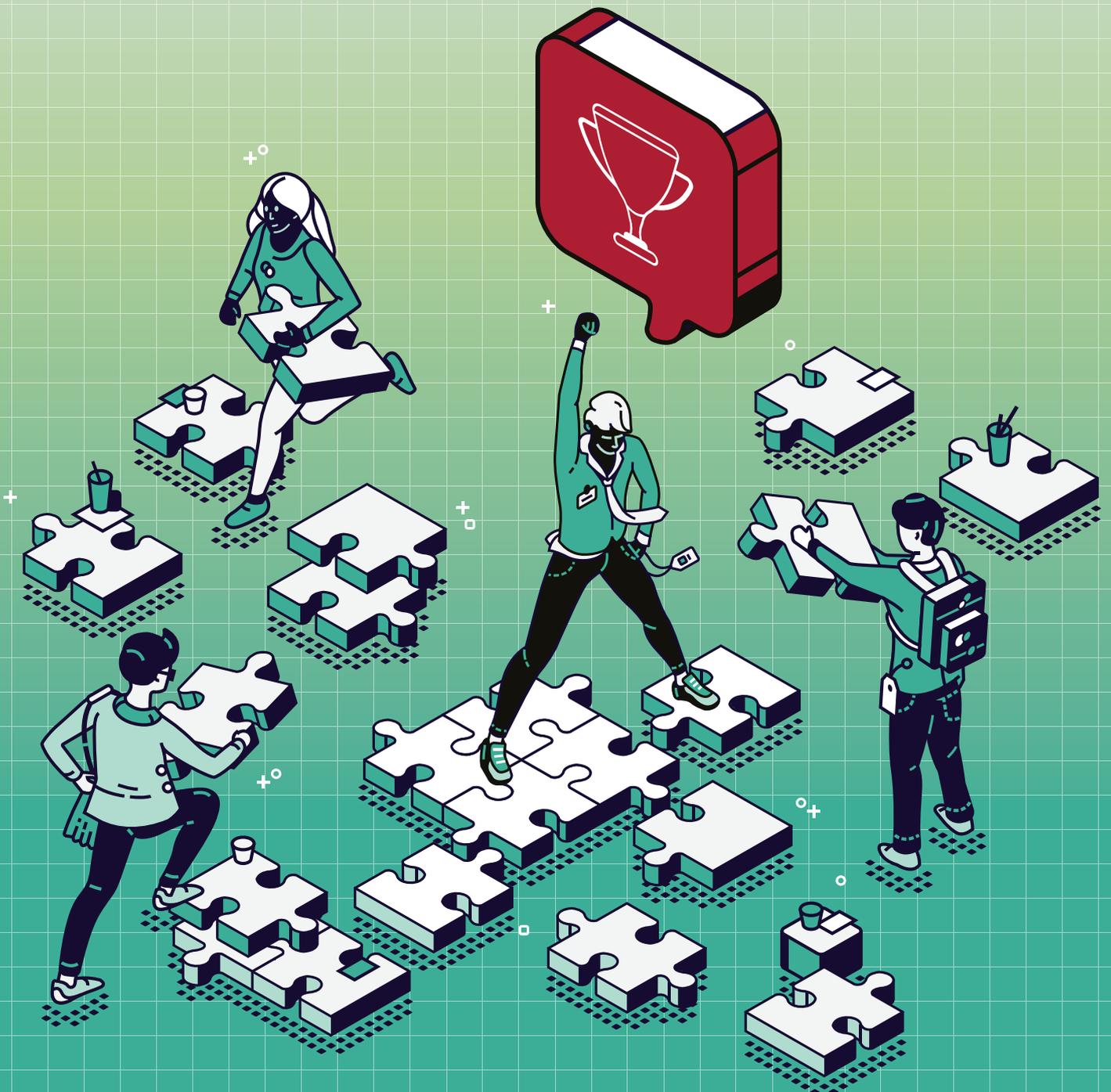
		OJK	INDUSTRI	KOLABORASI
1	Mengembangkan standarisasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan	1.1. Menyusun kamus kompetensi SDM sektor jasa keuangan	●	●
		1.2. Menyusun standar kompetensi SDM sektor jasa keuangan		●
		1.3. Mengembangkan sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan		●
2	Mengembangkan metode peningkatan kompetensi SDM sektor jasa keuangan	2.1. Menyusun program pengembangan kompetensi SDM sektor jasa keuangan	●	
		2.2. Mengembangkan metode pembelajaran pengembangan SDM sektor jasa keuangan	●	●
		2.3. Melaksanakan pengembangan SDM sektor jasa keuangan secara berkelanjutan	●	●
3	Mengembangkan infrastruktur pendukung pengembangan SDM sektor jasa keuangan	3.1. Memfasilitasi pendirian dan pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi	●	
		3.2. Mengembangkan sistem informasi pembelajaran	●	
		3.3. Mengoptimalkan pengembangan fungsi <i>learning</i> di sektor jasa keuangan		●
4	Mengembangkan SDM sektor jasa keuangan yang memiliki kompetensi digital	4.1. Mengidentifikasi kebutuhan <i>digital talent</i>	●	
		4.2. Mengembangkan kurikulum pendidikan dan pelatihan terkait <i>digital talent</i>		●
		4.3. Melaksanakan pengembangan kemampuan digital		●





# BAB 3

# RENCANA KEGIATAN





### 3.1 PETA JALAN MISI

#### 3.1.1 Mengembangkan Standardisasi Kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan

Tabel 3.1 Peta Jalan Misi 1

Strategi Pencapaian	Program Kerja	Pemangku Kepentingan	Target/ Output	2021	2022	2023	2024	2025
1.1. Menyusun kamus kompetensi SDM sektor jasa keuangan	Menyusun kamus kompetensi SDM sektor jasa keuangan berdasarkan fungsi, jabatan, dan profesi	OJK, DSN-MUI, industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Kamus kompetensi SDM sektor jasa keuangan secara bertahap		●	●		
1.2. Menyusun standar kompetensi SDM sektor jasa keuangan	Merancang baru dan mengkaji ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	OJK, Kemnaker, BNSP, DSN-MUI, akademisi, industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Penetapan SKKNI	●	●	●	●	●
	Merancang baru dan melakukan pengkinian Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	OJK, Kemnaker, BNSP, DSN-MUI, akademisi, industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Penetapan KKNI	●	●	●	●	●
1.3. Mengembangkan sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan	Memetakan kebutuhan sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan berdasarkan fungsi	OJK, DSN-MUI, industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Peta sertifikasi SDM sektor jasa keuangan	●	●	●	●	●
	Mengikuti sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan	Industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Pemenuhan sertifikasi kompetensi secara bertahap dengan persentase tertentu	●	●	●	●	●

□ : Implementasi dilakukan oleh industri/asosiasi

■ : Implementasi secara kolaborasi antara OJK, industri/asosiasi, dan instansi terkait



## 3.1.2 Mengembangkan Metode Peningkatan Kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan

Tabel 3.2 Peta Jalan Misi 2

Strategi Pencapaian		Program Kerja	Pemangku Kepentingan	Target/ Output	2021	2022	2023	2024	2025
2.1.	Menyusun program pengembangan kompetensi SDM sektor jasa keuangan	Merancang program peningkatan kompetensi untuk mempersiapkan <i>future skills</i>	Industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Matriks program peningkatan kompetensi		●	●		
		Melakukan kajian/ <i>mini survey</i> tentang praktek dan situasi terkini <i>human capital</i>	FHCPI	Kajian/ <i>mini survey</i> 2x dalam setahun	●	●	●	●	●
		Mendorong penyelarasan kurikulum pendidikan dengan kompetensi di industri	OJK, Kemendikbud, DSN-MUI, industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Perubahan kurikulum pendidikan yang selaras	●	●	●	●	●
2.2.	Mengembangkan metode pembelajaran pengembangan SDM sektor jasa keuangan	Mendorong pembentukan forum pengembangan SDM sektor jasa keuangan	OJK, industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Terbentuknya forum pengembangan SDM sektor jasa keuangan	●				
		Mendorong pelaksanaan program <i>attachment</i> SDM sektor jasa keuangan	OJK, industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Penetapan <i>guidance</i> program <i>attachment</i>		●			
			Industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Program <i>attachment</i> terlaksana			●	●	●
2.3.	Melaksanakan pengembangan SDM sektor jasa keuangan secara berkelanjutan	Melaksanakan program peningkatan kompetensi di masing-masing industri	Industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Pemenuhan pegawai yang menerima program peningkatan kompetensi secara bertahap dengan persentase tertentu	●	●	●	●	●
		Melaksanakan program pengembangan SDM	OJK, DSN-MUI, industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Peningkatan pemahaman peserta <i>capacity building</i> secara bertahap dengan persentase tertentu	●	●	●	●	●

□ : Implementasi dilakukan oleh industri/asosiasi

□ : Implementasi secara kolaborasi antara OJK, industri/asosiasi, dan instansi terkait



## BAB 3 RENCANA KEGIATAN

### 3.1.3 Mengembangkan Infrastruktur Pendukung Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan

Tabel 3.3 Peta Jalan Misi 3

Strategi Pencapaian	Program Kerja	Pemangku Kepentingan	Target/ Output	2021	2022	2023	2024	2025
3.1. Memfasilitasi pendirian dan pendaftaran Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	Memberikan surat rekomendasi LSP	OJK	Penyampaian surat rekomendasi	●	●	●	●	●
	Melaksanakan administrasi pendaftaran LSP	OJK	Pencatatan LSP terdaftar di OJK	●	●	●	●	●
3.2. Mengembangkan sistem informasi pembelajaran	Membangun <i>minisite</i> OJK Institute	OJK	<i>Launching minisite</i> OJK Institute	●				
	Membangun <i>e-Library</i>	OJK	<i>Launching e-Library</i>	●				
	Membangun <i>Knowledge Management System (KMS)</i>	OJK	<i>Launching KMS</i>		●	●	●	
3.3. Mengoptimalkan pengembangan fungsi <i>learning</i> di sektor jasa keuangan	Mendorong digitalisasi fungsi <i>learning</i> dengan menggunakan teknologi terkini	Industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Terbentuknya fungsi <i>learning</i> berbasis digital dan terintegrasi	●	●	●		

□ : Implementasi dilakukan oleh industri/asosiasi

■ : Implementasi dilakukan oleh OJK



## 3.1.4 Mengembangkan SDM Sektor Jasa Keuangan yang Memiliki Kompetensi Digital

Tabel 3.4 Peta Jalan Misi 4

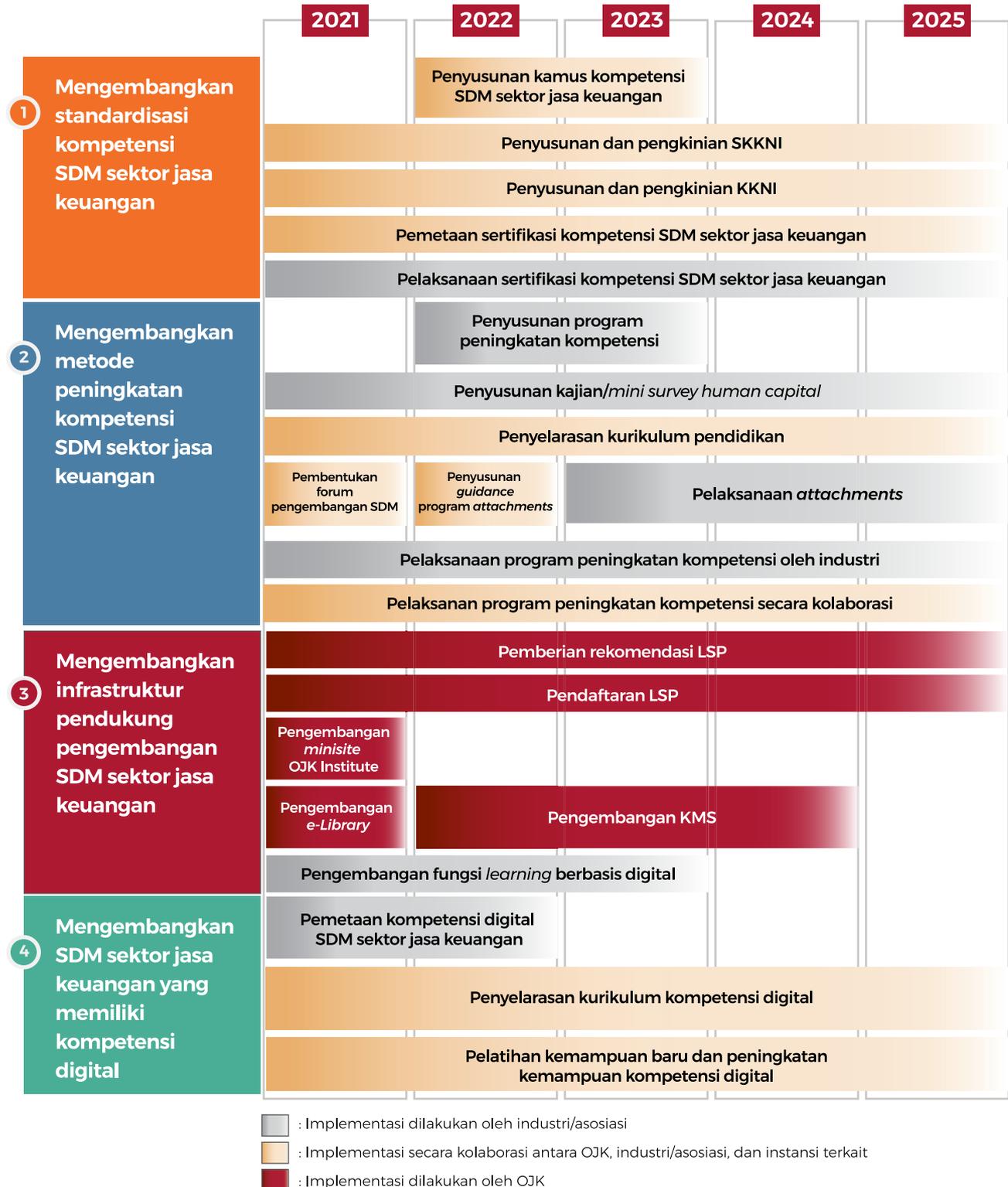
Strategi Pencapaian		Program Kerja	Pemangku Kepentingan	Target/ Output	2021	2022	2023	2024	2025
4.1.	Mengidentifikasi kebutuhan <i>digital talent</i>	Memetakan kompetensi digital SDM sektor jasa keuangan	Industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Kamus kompetensi digital	●	●			
4.2.	Mengembangkan kurikulum pendidikan dan pelatihan terkait <i>digital talent</i>	Mendorong penyesuaian kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi terkait digital	OJK, Kemendikbud, Kemkominfo, DSN-MUI, lembaga pendidikan, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Perubahan kurikulum pendidikan yang selaras	●	●	●	●	●
4.3.	Melaksanakan pengembangan kemampuan digital	Melaksanakan pelatihan kemampuan baru dan peningkatan kemampuan terkait digital	OJK, industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Tingkat pemahaman peserta secara bertahap dengan persentase tertentu	●	●	●	●	●

□ : Implementasi dilakukan oleh industri/asosiasi

□ : Implementasi secara kolaborasi antara OJK, industri/asosiasi, dan instansi terkait



### 3.2 JADWAL KEGIATAN



Gambar 3.1 Jadwal Kegiatan



## 3.3 IMPLEMENTASITAHUNAN

2021

Tabel 3.5 Implementasi 2021

No	Program Kerja	Pemangku Kepentingan	Target/Output	Strategi Pencapaian
1	Memberikan surat rekomendasi LSP	OJK	Penyampaian surat rekomendasi	3.1. Memfasilitasi pendirian dan pendaftaran LSP
2	Melaksanakan administrasi pendaftaran LSP	OJK	Pencatatan LSP terdaftar di OJK	3.1. Memfasilitasi pendirian dan pendaftaran LSP
3	Membangun <i>minisite</i> OJK Institute	OJK	<i>Launching minisite</i> OJK Institute	3.2. Mengembangkan sistem informasi pembelajaran
4	Membangun <i>e-Library</i>	OJK	<i>Launching e-Library</i>	3.2. Mengembangkan sistem informasi pembelajaran
5	Mengikuti sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan	Industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Pemenuhan sertifikasi kompetensi secara bertahap dengan persentase tertentu	1.3. Mengembangkan sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan
6	Melakukan kajian/ <i>mini survey</i> tentang praktek dan situasi terkini <i>human capital</i>	FHCPI	Kajian/ <i>mini survey</i> 2x dalam setahun	2.1. Menyusun program pengembangan kompetensi SDM sektor jasa keuangan
7	Melaksanakan program peningkatan kompetensi di masing-masing industri	Industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Pemenuhan pegawai yang menerima program peningkatan kompetensi secara bertahap dengan persentase tertentu	2.3. Melaksanakan pengembangan SDM sektor jasa keuangan secara berkelanjutan
8	Mendorong digitalisasi fungsi <i>learning</i> dengan menggunakan teknologi terkini	Industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Terbentuknya fungsi <i>learning</i> berbasis digital dan terintegrasi	3.3. Mengoptimalkan pengembangan fungsi <i>learning</i> di sektor jasa keuangan
9	Memetakan kompetensi digital SDM sektor jasa keuangan	Industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Kamus kompetensi digital	4.1. Mengidentifikasi kebutuhan <i>digital talent</i>
10	Merancang baru dan mengkaji ulang SKKNI	OJK, Kemnaker, BNSP, akademisi, industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Penetapan SKKNI	1.2. Menyusun standar kompetensi SDM sektor jasa keuangan
11	Merancang baru dan melakukan pengkinian KKNi	OJK, Kemnaker, BNSP, akademisi, industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Penetapan KKNi	1.2. Menyusun standar kompetensi SDM sektor jasa keuangan
12	Memetakan kebutuhan sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan berdasarkan fungsi	OJK, industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Peta sertifikasi SDM sektor jasa keuangan	1.3. Mengembangkan sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan



## BAB 3 RENCANA KEGIATAN

2021

Lanjutan Tabel 3.5 Implementasi 2021

No	Program Kerja	Pemangku Kepentingan	Target/Output	Strategi Pencapaian
13	Mendorong penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kompetensi di industri	OJK, Kemendikbud, industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Perubahan kurikulum pendidikan yang selaras	2.1. Menyusun program pengembangan kompetensi SDM sektor jasa keuangan
14	Mendorong pembentukan forum pengembangan SDM sektor jasa keuangan	OJK, industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Terbentuknya forum pengembangan SDM sektor jasa keuangan	2.2. Mengembangkan metode pembelajaran pengembangan SDM sektor jasa keuangan
15	Melaksanakan program pengembangan SDM	OJK, industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Peningkatan pemahaman peserta <i>capacity building</i> secara bertahap dengan persentase tertentu	2.3. Melaksanakan pengembangan SDM sektor jasa keuangan secara berkelanjutan
16	Mendorong penyesuaian kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi terkait digital	OJK, Kemendikbud, Kemkominfo, lembaga pendidikan, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Perubahan kurikulum pendidikan yang selaras	4.2. Mengembangkan kurikulum pendidikan dan pelatihan terkait <i>digital talent</i>
17	Melaksanakan pelatihan kemampuan baru dan peningkatan kemampuan terkait digital	OJK dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Tingkat pemahaman peserta secara bertahap dengan persentase tertentu	4.3. Melaksanakan pengembangan kemampuan digital

 : Implementasi dilakukan oleh industri/asosiasi

 : Implementasi secara kolaborasi antara OJK, industri/asosiasi, dan instansi terkait

 : Implementasi dilakukan oleh OJK



**Tabel 3.6** Implementasi 2022

No	Program Kerja	Pemangku Kepentingan	Target/Output	Strategi Pencapaian
1	Memberikan surat rekomendasi LSP	OJK	Penyampaian surat rekomendasi	3.1. Memfasilitasi pendirian dan pendaftaran LSP
2	Melaksanakan administrasi pendaftaran LSP	OJK	Pencatatan LSP terdaftar di OJK	3.1. Memfasilitasi pendirian dan pendaftaran LSP
3	Membangun KMS	OJK	Launching KMS	3.2. Mengembangkan sistem informasi pembelajaran
4	Mengikuti sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan	Industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Pemenuhan sertifikasi kompetensi secara bertahap dengan persentase tertentu	1.3. Mengembangkan sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan
5	Merancang program peningkatan kompetensi untuk mempersiapkan <i>future skills</i>	Industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Matriks program peningkatan kompetensi	2.1. Menyusun program pengembangan kompetensi SDM sektor jasa keuangan
6	Melakukan kajian/ <i>mini survey</i> tentang praktek dan situasi terkini human capital	FHCPI	Kajian/ <i>mini survey</i> 2x dalam setahun	2.1. Menyusun program pengembangan kompetensi SDM sektor jasa keuangan
7	Melaksanakan program peningkatan kompetensi di masing-masing industri	Industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Pemenuhan pegawai yang menerima program peningkatan kompetensi secara bertahap dengan persentase tertentu	2.3. Melaksanakan pengembangan SDM sektor jasa keuangan secara berkelanjutan
8	Mendorong digitalisasi fungsi <i>learning</i> dengan menggunakan teknologi terkini	Industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Terbentuknya fungsi <i>learning</i> berbasis digital dan terintegrasi	3.3. Mengoptimalkan pengembangan fungsi <i>learning</i> di sektor jasa keuangan
9	Memetakan kompetensi digital SDM sektor jasa keuangan	Industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Kamus kompetensi digital	4.1. Mengidentifikasi kebutuhan <i>digital talent</i>
10	Menyusun kamus kompetensi SDM sektor jasa keuangan berdasarkan fungsi, jabatan, dan profesi	OJK, industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Kamus kompetensi SDM sektor jasa keuangan secara bertahap	1.1. Menyusun kamus kompetensi SDM sektor jasa keuangan
11	Merancang baru dan mengkaji ulang SKKNI	OJK, Kemnaker, BNSP, akademisi, industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Penetapan SKKNI	1.2. Menyusun standar kompetensi SDM sektor jasa keuangan
12	Merancang baru dan melakukan pengkinian KKNi	OJK, Kemnaker, BNSP, akademisi, industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Penetapan KKNi	1.2. Menyusun standar kompetensi SDM sektor jasa keuangan



## BAB 3 RENCANA KEGIATAN

2022

Lanjutan Tabel 3.6 Implementasi 2022

No	Program Kerja	Pemangku Kepentingan	Target/Output	Strategi Pencapaian
13	Memetakan kebutuhan sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan berdasarkan fungsi	OJK, industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Peta sertifikasi SDM sektor jasa keuangan	1.3. Mengembangkan sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan
14	Mendorong penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kompetensi di industri	OJK, Kemendikbud, industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Perubahan kurikulum pendidikan yang selaras	2.1. Menyusun program pengembangan kompetensi SDM sektor jasa keuangan
15	Mendorong pelaksanaan program <i>attachment</i> SDM sektor jasa keuangan	OJK, industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Penetapan <i>guidance</i> program <i>attachment</i>	2.2. Mengembangkan metode pembelajaran pengembangan SDM sektor jasa keuangan
16	Melaksanakan program pengembangan SDM	OJK, industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Peningkatan pemahaman peserta <i>capacity building</i> secara bertahap dengan persentase tertentu	2.3. Melaksanakan pengembangan SDM sektor jasa keuangan secara berkelanjutan
17	Mendorong penyesuaian kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi terkait digital	OJK, Kemendikbud, Kemkominfo, lembaga pendidikan, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Perubahan kurikulum pendidikan yang selaras	4.2. Mengembangkan kurikulum pendidikan dan pelatihan terkait <i>digital talent</i>
18	Melaksanakan pelatihan kemampuan baru dan peningkatan kemampuan terkait digital	OJK, industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Tingkat pemahaman peserta secara bertahap dengan persentase tertentu	4.3. Melaksanakan pengembangan kemampuan digital

□ : Implementasi dilakukan oleh industri/asosiasi

□ : Implementasi secara kolaborasi antara OJK, industri/asosiasi, dan instansi terkait

□ : Implementasi dilakukan oleh OJK



**Tabel 3.7** Implementasi 2023

No	Program Kerja	Pemangku Kepentingan	Target/Output	Strategi Pencapaian
1	Memberikan surat rekomendasi LSP	OJK	Penyampaian surat rekomendasi	3.1. Memfasilitasi pendirian dan pendaftaran LSP
2	Melaksanakan administrasi pendaftaran LSP	OJK	Pencatatan LSP terdaftar di OJK	3.1. Memfasilitasi pendirian dan pendaftaran LSP
3	Membangun KMS	OJK	<i>Launching</i> KMS	3.2. Mengembangkan sistem informasi pembelajaran
4	Mengikuti sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan	Industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Pemenuhan sertifikasi kompetensi secara bertahap dengan persentase tertentu	1.3. Mengembangkan sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan
5	Merancang program peningkatan kompetensi untuk mempersiapkan <i>future skills</i>	Industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Matriks program peningkatan kompetensi	2.1. Menyusun program pengembangan kompetensi SDM sektor jasa keuangan
6	Melakukan kajian/ <i>mini survey</i> tentang praktek dan situasi terkini <i>human capital</i>	FHCPI	Kajian/ <i>mini survey</i> 2x dalam setahun	2.1. Menyusun program pengembangan kompetensi SDM sektor jasa keuangan
7	Mendorong pelaksanaan program <i>attachment</i> SDM sektor jasa keuangan	Industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Program <i>attachment</i> terlaksana	2.2. Mengembangkan metode pembelajaran pengembangan SDM sektor jasa keuangan
8	Melaksanakan program peningkatan kompetensi di masing-masing industri	Industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Pemenuhan pegawai yang menerima program peningkatan kompetensi secara bertahap dengan persentase tertentu	2.3. Melaksanakan pengembangan SDM sektor jasa keuangan secara berkelanjutan
9	Mendorong digitalisasi fungsi <i>learning</i> dengan menggunakan teknologi terkini	Industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Terbentuknya fungsi <i>learning</i> berbasis digital dan terintegrasi	3.3. Mengoptimalkan pengembangan fungsi <i>learning</i> di sektor jasa keuangan
10	Menyusun kamus kompetensi SDM sektor jasa keuangan berdasarkan fungsi, jabatan, dan profesi	OJK, industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Kamus kompetensi SDM sektor jasa keuangan secara bertahap	1.1. Menyusun kamus kompetensi SDM sektor jasa keuangan
11	Merancang baru dan mengkaji ulang SKKNI	OJK, Kemnaker, BNSP, akademisi, industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Penetapan SKKNI	1.2. Menyusun standar kompetensi SDM sektor jasa keuangan
12	Merancang baru dan melakukan pengkinian KKNi	OJK, Kemnaker, BNSP, akademisi, industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Penetapan KKNi	1.2. Menyusun standar kompetensi SDM sektor jasa keuangan



## BAB 3 RENCANA KEGIATAN

2023

Lanjutan Tabel 3.7 Implementasi 2023

No	Program Kerja	Pemangku Kepentingan	Target/Output	Strategi Pencapaian
13	Memetakan kebutuhan sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan berdasarkan fungsi	OJK, industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Peta sertifikasi SDM sektor jasa keuangan	1.3. Mengembangkan sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan
14	Mendorong penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kompetensi di industri	OJK, Kemendikbud, industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Perubahan kurikulum pendidikan yang selaras	2.1. Menyusun program pengembangan kompetensi SDM sektor jasa keuangan
15	Melaksanakan program pengembangan SDM	OJK, industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Peningkatan pemahaman peserta <i>capacity building</i> secara bertahap dengan persentase tertentu	2.3. Melaksanakan pengembangan SDM sektor jasa keuangan secara berkelanjutan
16	Mendorong penyesuaian kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi terkait digital	OJK, Kemendikbud, Kemkominfo, lembaga pendidikan, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Perubahan kurikulum pendidikan yang selaras	4.2. Mengembangkan kurikulum pendidikan dan pelatihan terkait <i>digital talent</i>
17	Melaksanakan pelatihan kemampuan baru dan peningkatan kemampuan terkait digital	OJK, industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Tingkat pemahaman peserta secara bertahap dengan persentase tertentu	4.3. Melaksanakan pengembangan kemampuan digital

□ : Implementasi dilakukan oleh industri/asosiasi

□ : Implementasi secara kolaborasi antara OJK, industri/asosiasi, dan instansi terkait

□ : Implementasi dilakukan oleh OJK



**Tabel 3.8** Implementasi 2024

No	Program Kerja	Pemangku Kepentingan	Target/Output	Strategi Pencapaian
1	Memberikan surat rekomendasi LSP	OJK	Penyampaian surat rekomendasi	3.1. Memfasilitasi pendirian dan pendaftaran LSP
2	Melaksanakan administrasi pendaftaran LSP	OJK	Pencatatan LSP terdaftar di OJK	3.1. Memfasilitasi pendirian dan pendaftaran LSP
3	Membangun KMS	OJK	<i>Launching</i> KMS	3.2. Mengembangkan sistem informasi pembelajaran
4	Mengikuti sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan	Industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Pemenuhan sertifikasi kompetensi secara bertahap dengan persentase tertentu	1.3. Mengembangkan sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan
5	Melakukan kajian/ <i>mini survey</i> tentang praktek dan situasi terkini <i>human capital</i>	FHCPI	Kajian/ <i>mini survey</i> 2x dalam setahun	2.1. Menyusun program pengembangan kompetensi SDM sektor jasa keuangan
6	Mendorong pelaksanaan program <i>attachment</i> SDM sektor jasa keuangan	Industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Program <i>attachment</i> terlaksana	2.2. Mengembangkan metode pembelajaran pengembangan SDM sektor jasa keuangan
7	Melaksanakan program peningkatan kompetensi di masing-masing industri	Industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Pemenuhan pegawai yang menerima program peningkatan kompetensi secara bertahap dengan persentase tertentu	2.3. Melaksanakan pengembangan SDM sektor jasa keuangan secara berkelanjutan
8	Merancang baru dan mengkaji ulang SKKNI	OJK, Kemnaker, BNSP, akademisi, industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Penetapan SKKNI	1.2. Menyusun standar kompetensi SDM sektor jasa keuangan
9	Merancang baru dan melakukan pengkinian KKNi	OJK, Kemnaker, BNSP, akademisi, industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Penetapan KKNi	1.2. Menyusun standar kompetensi SDM sektor jasa keuangan
10	Memetakan kebutuhan sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan berdasarkan fungsi	OJK, industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Peta sertifikasi SDM sektor jasa keuangan	1.3. Mengembangkan sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan
11	Mendorong penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kompetensi di industri	OJK, Kemendikbud, industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Perubahan kurikulum pendidikan yang selaras	2.1. Menyusun program pengembangan kompetensi SDM sektor jasa keuangan
12	Melaksanakan program pengembangan SDM	OJK, industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Peningkatan pemahaman peserta <i>capacity building</i> secara bertahap dengan persentase tertentu	2.3. Melaksanakan pengembangan SDM sektor jasa keuangan secara berkelanjutan



## BAB 3 RENCANA KEGIATAN

2024

Lanjutan Tabel 3.8 Implementasi 2024

No	Program Kerja	Pemangku Kepentingan	Target/Output	Strategi Pencapaian
13	Mendorong penyesuaian kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi terkait digital	OJK, Kemendikbud, Kemkominfo, lembaga pendidikan, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Perubahan kurikulum pendidikan yang selaras	4.2. Mengembangkan kurikulum pendidikan dan pelatihan terkait <i>digital talent</i>
14	Melaksanakan pelatihan kemampuan baru dan peningkatan kemampuan terkait digital	OJK, industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Tingkat pemahaman peserta secara bertahap dengan persentase tertentu	4.3. Melaksanakan pengembangan kemampuan digital

□ : Implementasi dilakukan oleh industri/asosiasi

□ : Implementasi secara kolaborasi antara OJK, industri/asosiasi, dan instansi terkait

□ : Implementasi dilakukan oleh OJK



**Tabel 3.9** Implementasi 2025

No	Program Kerja	Pemangku Kepentingan	Target/Output	Strategi Pencapaian
1	Memberikan surat rekomendasi LSP	OJK	Penyampaian surat rekomendasi	3.1. Memfasilitasi pendirian dan pendaftaran LSP
2	Melaksanakan administrasi pendaftaran LSP	OJK	Pencatatan LSP terdaftar di OJK	3.1. Memfasilitasi pendirian dan pendaftaran LSP
3	Mengikuti sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan	Industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Pemenuhan sertifikasi kompetensi secara bertahap dengan persentase tertentu	1.3. Mengembangkan sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan
4	Melakukan kajian/ <i>mini survey</i> tentang praktek dan situasi terkini <i>human capital</i>	FHCPI	Kajian/ <i>mini survey</i> 2x dalam setahun	2.1. Menyusun program pengembangan kompetensi SDM sektor jasa keuangan
5	Mendorong pelaksanaan program <i>attachment</i> SDM sektor jasa keuangan	Industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Program <i>attachment</i> terlaksana	2.2. Mengembangkan metode pembelajaran pengembangan SDM sektor jasa keuangan
6	Melaksanakan program peningkatan kompetensi di masing-masing industri	Industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Pemenuhan pegawai yang menerima program peningkatan kompetensi secara bertahap dengan persentase tertentu	2.3. Melaksanakan pengembangan SDM sektor jasa keuangan secara berkelanjutan
7	Merancang baru dan mengkaji ulang SKKNI	OJK, Kemnaker, BNSP, akademisi, industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Penetapan SKKNI	1.2. Menyusun standar kompetensi SDM sektor jasa keuangan
8	Merancang baru dan melakukan pengkinian KKNI	OJK, Kemnaker, BNSP, akademisi, industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Penetapan KKNI	1.2. Menyusun standar kompetensi SDM sektor jasa keuangan
9	Memetakan kebutuhan sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan berdasarkan fungsi	OJK, industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Peta sertifikasi SDM sektor jasa keuangan	1.3. Mengembangkan sertifikasi kompetensi SDM sektor jasa keuangan
10	Mendorong penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kompetensi di industri	OJK, Kemendikbud, industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Perubahan kurikulum pendidikan yang selaras	2.1. Menyusun program pengembangan kompetensi SDM sektor jasa keuangan
11	Melaksanakan program pengembangan SDM	OJK, industri, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Peningkatan pemahaman peserta <i>capacity building</i> secara bertahap dengan persentase tertentu	2.3. Melaksanakan pengembangan SDM sektor jasa keuangan secara berkelanjutan
12	Mendorong penyesuaian kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi terkait digital	OJK, Kemendikbud, Kemkominfo, lembaga pendidikan, dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Perubahan kurikulum pendidikan yang selaras	4.2. Mengembangkan kurikulum pendidikan dan pelatihan terkait <i>digital talent</i>



## BAB 3 RENCANA KEGIATAN



Lanjutan Tabel 3.9 Implementasi 2025

No	Program Kerja	Pemangku Kepentingan	Target/Output	Strategi Pencapaian
13	Melaksanakan pelatihan kemampuan baru dan peningkatan kemampuan terkait digital	OJK, industri dan semua asosiasi di sektor jasa keuangan	Tingkat pemahaman peserta secara bertahap dengan persentase tertentu	4.3. Melaksanakan pengembangan kemampuan digital

-  : Implementasi dilakukan oleh industri/asosiasi
-  : Implementasi secara kolaborasi antara OJK, industri/asosiasi, dan instansi terkait
-  : Implementasi dilakukan oleh OJK



- DataReportal. 2021. Digital 2021: Local Country Headlines. Diakses pada 1 April 2021, dari <https://datareportal.com/reports/digital-2021-local-country-headlines>
- DinarStandard. 2020. State of the Global Islamic Economy Report.
- EY. 2018. ASEAN FinTech Census 2018.
- IBI. 2017. Kepatuhan Dalam Bisnis Bank.
- ICD. 2020. Islamic Finance Development Report 2020: Progressing Through Adversity.
- IFC. 2021. A Green Reboot for Emerging Markets.
- IMD. 2020. IMD World Talent Ranking 2020.
- Kemenkeu. 2020. APBN KITA: Kinerja dan Fakta.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2018. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.
- Lokadata. 2020. Ketika yang Lain Setop, Kredit ke Sektor Ini Malah Mengalir Deras. Diakses pada 1 April 2021, dari <https://lokadata.id/artikel/ketika-yang-lain-setop-kredit-ke-sektor-ini-malah-mengalir-deras>
- Media Grup News. 2020. Perlu Cetak Biru Bidang SDM. Diakses pada 1 April 2021, dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/286110/perlu-cetak-biru-bidang-sdm>
- OJK. 2020. Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025.
- OJK. 2020. Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024.
- OJK. 2021. Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025.
- OJK. 2021. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025).
- PwC. 2018. Indonesia Banking Survey: Technology shift in Indonesia is underway.
- Standard Chartered. 2019. Chart: The World's Largest 10 Economies in 2030. Diakses pada 1 April 2021, dari <https://www.visualcapitalist.com/worlds-largest-10-economies-2030/>
- WEF. 2019. The Global Competitiveness Report 2019.
- WEF. 2020. The Future of Jobs Report 2020.
- WIPO. 2020. Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation?.
- WWF. 2020. Sustainable Banking Assessment 2020.

halaman ini sengaja dikosongkan  
this page intentionally left blank



**OJK Institute** - *Center of Excellence*  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
*Indonesia Financial Services Authority*

Wisma Mulia 2 Lantai 20  
Jl. Gatot Subroto No. 42  
Jakarta 10270  
Tel. 62 21 2960 0000

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)